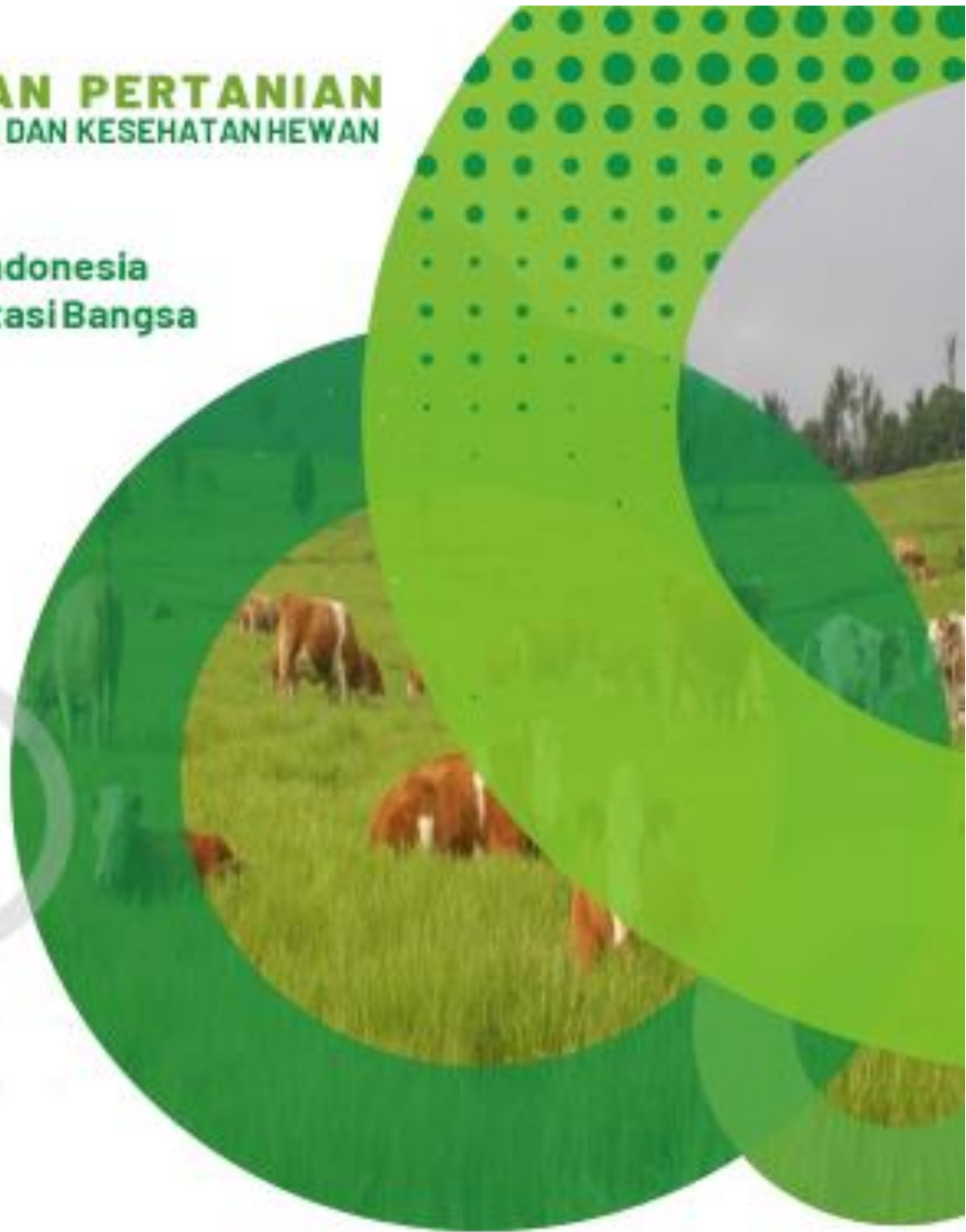




KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

#Jayalah Peternakan Indonesia
#Peternakan Kita Prestasi Bangsa



LAPORAN TAHUNAN 2022

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022". Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 menyampaikan hasil pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan

dalam Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Program dan Kegiatan yang diemban oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Laporan Tahunan ini menginformasikan gambaran umum capaian indikator makro Subsektor Peternakan dalam mendukung perekonomian nasional sebagai hasil pelaksanaan Program/ Kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Capaian indikator tersebut antara lain Produk Domestik Bruto, Kinerja Ekspor, Investasi, Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) dan Nilai Tukar Usaha Petani Peternak (NTUPT). Selain itu, juga menginformasikan produksi dan populasi peternakan serta kinerja pendukungnya sebagai dukungan pada aspek ketahanan pangan asal hewan serta pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan selama tahun 2022 guna mendukung terwujudnya Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Maju, Mandiri dan Modern.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022. Kritik dan saran membangun kami harapkan guna meningkatkan kualitas Laporan Tahunan di masa mendatang. Semoga Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta,
Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc., IPU
NIP. 19660223.199303.1.001

CATATAN PERISTIWA GLOBAL TAHUN 2022

Pemulihan Pandemi Covid-19



Pulihnya permintaan pascapandemi mengakibatkan ketidakseimbangan **supply-demand** memicu **kenaikan harga komoditas**

Konflik Geopolitik



Perang dan ketegangan geopolitik di sejumlah wilayah mendisrupsi **rantai pasok**, memicu **kenaikan harga pangan dan energi**

Pengetatan Keuangan Sejumlah Negara



Akibat tingginya inflasi, sejumlah negara menaikkan **tingkat suku bunga**, yang memicu **capital outflow** dari negara berkembang

Tekanan Inflasi Global



Tingkat inflasi tahun 2022 merupakan yang **tertinggi sejak tahun 2008** Ketika ekonomi dunia mengalami resesi besar

“Perekonomian global mengalami sejumlah guncangan sepanjang tahun 2022, berakibat pada **tertahannya pertumbuhan ekonomi** dan **tekanan inflasi yang lebih tinggi** dari tahun-tahun sebelumnya. “

Sumber: Dirangkul dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, 2023

KILAS BALIK KINERJA

1. JANUARI **Jadikan 2022 Tahun Peternakan, Mentan SYL Dorong Percepatan Kinerja Program PKH**

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendorong percepatan implementasi kinerja peternakan dengan melakukan konsolidasi pelaksanaan program kegiatan peternakan dan kesehatan hewan Tahun 2022 pada Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Utama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022, Selasa (4/1).

“Tahun ini, tahun peternakan, fokus kita kedepan semua keputusan yang diambil harus akurat dan terakselerasi dengan tepat, terarah dan pertajam program peternakan serta lakukan harmonisasi sehingga mencapai kesejahteraan peternak yang lebih baik” ungkap SYL.

Dok: 01



01

Genjot Produksi Daging Sapi Nasional, Kementan Gencarkan Integrasi Sapi-Sawit

2. FEBRUARI



Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya meningkatkan produksi daging sapi di dalam negeri, salah satunya melalui program terobosan sistem integrasi sapi dengan sawit. Hal tersebut disampaikan Nasrullah pada acara *1st Stadium General Peluang dan Tantangan Implementasi Model Komersial dan Kemitraan Inti-Plasma*, Selasa, (23/2).

Ia katakan, sistem usaha pembiakan sebagai penghasil sapi bakalan di negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Brazil dan Argentina memiliki lahan penggembalaan yang luas. “Mari kita memanfaatkan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang luas ini untuk diintegrasikan dengan sapi”, imbuh Nasrullah.

Dok: 02

02

3. MARET

Kementan Dorong Penguatan Hilirisasi dan Penataan Rantai Pasok Telur Ayam Ras

Merespon harga telur ayam ras fluktuatif dan cenderung rendah di tingkat peternak, Kementerian Pertanian menekankan pentingnya penguatan di aspek hilirisasi dan rantai pasok telur. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah saat acara Rembuk Nasional Peternak Rakyat Ayam Ras Petelur di Yogyakarta (24/03).

“Kelebihan kita hanya 11% dan ini sangat sedikit apabila dibandingkan dengan cadangan pangan negara lainnya. seharusnya jika tertata dengan baik di hillirisasi dan distribusi, maka tidak akan ada masalah,” ungkap Dirjen PKH Nasrullah. Ia katakan, kelebihan produksi telur ayam ras ini adalah untuk cadangan pangan nasional, jika terjadi kondisi darurat, dimana semua negara harus mempunyai cadangan pangan.

Dok: 03



03

Kementan dan BNPB Kerjasama dengan FAO Lakukan Simulasi Evaluasi Ternak Dalam Penanggulangan Bencana

4. APRIL

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan FAO Indonesia melakukan simulasi evakuasi ternak dalam penanggulangan bencana.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah mengatakan, pihaknya menyadari Indonesia memiliki berbagai risiko bencana dengan 127 gunung berapi. Maka, hewan ternak juga perlu mendapatkan perhatian lebih demi kelangsungan hidup manusia.

"Hal ini juga kaitannya dengan lebih dari 1,2 juta populasi yang tinggal di sekitar wilayah gunung berapi di seluruh Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian dan peternakan, khususnya peternak keluarga berskala kecil," kata Nasrullah.



04

Dok: 04

5. MEI

Tidak Usah Panik, Kementan Pastikan Penangan PMK Sudah Berjalan Maksimal

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memastikan penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) terus dilakukan secara maksimal. Diantaranya dengan mendistribusikan obat, penyuntikan vitamin, pemberian antibiotik dan penguatan imun. Disisi lain, Kementan juga terus bekerja melakukan riset dan uji lab untuk menemukan vaksin dalam negeri.

"Intinya yang terkena harus diberikan obat, dan yang tidak kena harus dinaikan imunnya. Besok itu kita sudah ada pelatihan untuk dokter kesehatan. Dan khusus untuk tenaga medisnya kita sudah sebar di lapangan," ujar SYL, Rabu, 11 Mei 2022.

"Kita telah menemukan stereotipe yang ada dan kita akan menghadirkan vaksin dalam waktu yang sangat singkat. Vaksin yang akan kita pake vaksin Nasional tapi butuh waktu. Minimal dalam 14 hari ini kita ada vaksin yang dari luar negeri, selanjutnya akan kita produksi sendiri di Pusvetma, Surabaya" katanya.

Dok: 05



05

Kementan: Gerakan Disinfeksi Nasional Untuk Penanganan PMK

6. JUNI

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo launching gerakan disinfeksi nasional dalam upaya pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK). Langkah ini diinisiasi Kementerian Pertanian (Kementan) yang didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Palang Merah Indonesia (PMI).

"Saya bersama BNPB bersama PMI hari ini melepas Gerakan Disinfeksi Nasional untuk pengendalian PMK yang menyerang ternak kita di 19 provinsi yang ada. Kerjasama dengan BNPB, kerjasama dengan PMI dan semua pihak dibutuhkan dalam menghadapi serangan wabah seperti ini,"ucap Mentan saat diwawancarai usai acara Launching Gerakan Disinfeksi Nasional PMK di Kampus Kementan, Jakarta, Kamis (30/6/22).

Lebih lanjut Mentan Syahrul menyampaikan kolaborasi dalam penanganan PMK menjadikan upaya pengendalian lebih cepat dan lebih tanggap dengan langkah extraordinary yang disusun secara bersama diantaranya dengan BNPB, PMI, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Perhubungan.



06

Dok: 06

7. JULI

Mentan SYL Lepas Ekspor Produk Unggas ke Pasar Singapura

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) melepas ekspor perdana produk unggas ke Singapura. Sebanyak 50 ton dengan nilai Rp. 2 Milyar karkas ayam berupa ayam beku dan ayam olahan melenggang ke pasar Singapura yang dikenal memiliki standar keamanan pangan yang tinggi (13/07).

Keberhasilan produk unggas dalam negeri menembus pasar ekspor bukan kali pertama, berbagai produk peternakan asal Indonesia telah secara rutin di ekspor ke Jepang dan Timor Leste. Bersamaan dengan pelepasan ekspor ke Singapura, Mentan SYL juga melepas produk olahan unggas ke Jepang dan karkas ayam ke Timor Leste dengan masing masing volume sebanyak 12 Ton atau setara Rp. 1 Milyar.

“Kita sama - sama berbahagia hari ini, karena produk dan komoditi pertanian termasuk peternakan kita hari ini berhasil dilepas ke pasar ekspor Singapura, Jepang dan Timor Leste” ungkap Syahrul di Kantor Pusat PT. Charoen Pokhpand Indonesia, Tbk di Jakarta.

Dok: 07



07

Kementan Perluas Cakupan Pendataan Ternak Pasca Vaksinasi PMK Secara Digital

8. AGUSTUS

Kementerian Pertanian (Kementan) memperluas cakupan jumlah penandaan dan pendataan ternak pasca vaksinasi Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) menggunakan tanda pengenal atau identitas pada ternak berupa *Eartag Secure QR Code* yang terhubung secara digital. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Nasrullah saat menghadiri penandatanganan kerja sama dengan Peruri untuk pengadaan *Eartag Secure QR Code* untuk ternak yang dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (03/08).

“Pemasangan *eartag* ini bertujuan untuk memudahkan pencatatan dan pendataan, serta seleksi dalam tata laksana pemeliharaan,” ungkap Dirjen PKH Nasrullah. “Kita kerjasama dengan Peruri untuk pengadaan *eartag Secure QR Code* sebanyak 14.825.819 unit yang akan didistribusikan ke 23 provinsi di Indonesia terdampak PMK,” imbuhnya menjelaskan.

Dok: 08



08

9. SEPTEMBER **Pertahankan Zero Case di Bali, Kementan Latih Petugas Vaksinator PMK**

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), bekerja sama dengan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), menyelenggarakan pelatihan teknis untuk petugas vaksinator PMK di Provinsi Bali pada 15-17 September 2022.

Lebih dari tiga ratus dokter hewan dan paramedik kesehatan hewan dari Dinas Kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Provinsi Bali ambil bagian dalam pelatihan ini. Dukungan juga diberikan oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, yang mengerahkan seratus mahasiswa FKH tingkat akhir dan koass, untuk membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi di Bali.

“Kita berharap menjelang pertemuan tingkat tinggi G20 yang akan dilaksanakan di Bali nantinya, ternak-ternak di provinsi ini sudah divaksin semua,” ungkap Nuryani. “Targetnya adalah 80% dari total populasi hewan rentan PMK di Bali, sudah tervaksinasi pada Oktober nanti.”

Dok: 09



09

Dianggap Berhasil, Kementan Beberkan Strategi Vaksinasi Flu Burung di Forum Internasional

10. OKTOBER



Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan, Indonesia sebagai salah satu negara endemis dianggap telah berhasil dalam mengendalikan situasi Avian Influenza (AI) melalui program vaksinasi oleh World Organization for Animal Health (WOAH/OIE). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Nuryani Zainuddin secara tertulis melalui Rilisnya pada hari ini Jumat (29/10).

Nuryani menjelaskan, atas keberhasilan tersebut, Indonesia diundang untuk berbagi pengalaman dalam pengendalian HPAI H5N1 pada pertemuan “High Pathogenicity Avian Influenza-Vaccination Strategies to Prevent and Control HPAI: Removing Unnecessary Barriers for Usage” yang diselenggarakan oleh International Alliance for Biological Standardization (IABS) dan World Organization for Animal Health (WOAH/OIE) di Paris, Perancis pada 25-26 Oktober 2022.

Dok: 10

10

11. NOVEMBER Sosialisasi Peta Jalan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional

Pada tanggal 21 November 2022, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan Sosialisasi Peta Jalan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional secara Hybrid. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik dari Kementerian Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)/Pemerintah Daerah (Pemda), juga berbagai asosiasi/organisasi di bidang peternakan dan Kesehatan hewan.

Peta Jalan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional Tahun 2023-2035 ini merupakan dokumen program pemberantasan PMK resmi di Indonesia dalam upaya mewujudkan Kembali Indonesia sebagai negara bebas PMK.

Dok: 11



11

Indonesia Kembali Berikan Pelatihan Bagi Petugas IB Palestina

Tahun ini Indonesia kembali memberikan pelatihan bagi petugas Inseminasi Buatan (IB) dari negara Palestina. Pengembangan kapasitas bagi petugas Palestina dalam sub sektor peternakan tersebut dilakukan dalam kerangka kerjasama pelatihan “Third Country Training Course on Management of Artificial Insemination for Palestine”. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Agung Suganda dalam keterangan persnya hari ini Selasa (20/12).

“Pelaksanaan pelatihan IB yang diberikan oleh Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari ini merupakan pelatihan yang ke-3 bagi petugas IB dari negara palestina”, ungkap Agung. “Kami berharap pelatihan ini bermanfaat dan para peserta, sehingga Ketika kembali ke negaranya dapat mengembangkan teknologi ini bahkan dapat menjadi innovator”, imbuhnya.

Dok: 12





12

12. DESEMBER



DAFTAR ISI


Kata Pengantar
Catatan Peristiwa Global Tahun 2022
Kilas Balik Kinerja
Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Sejarah Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Visi dan Misi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan c. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan d. Program dan Sasaran Program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan e. Kegiatan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan f. Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan g. Struktur Organisasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan h. Sumber Daya Manusia Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 	
BAB II	KINERJA MAKRO PETERNAKAN	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Produk Domestik Bruto atas Harga Konstan 2010 b. Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Peternakan & Kesehatan Hewan c. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) d. Nilai Tukar Usaha Petani Peternakan (NTUPT) e. Investasi Subsektor Peternakan f. Penyerapan Tenaga Kerja Subsektor Peternakan 	
BAB III	KINERJA PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Populasi dan Produksi Peternakan b. Kinerja Peningkatan Produksi Pakan Ternak c. Kinerja Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 	

- d. Kinerja Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak
- e. Kinerja Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- f. Kinerja Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
- g. Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan & Keswan
- h. Kinerja Anggaran Tahun 2022
- i. Penghargaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Sepanjang Tahun 2022

BAB IV	PROGRAM/KEGIATAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2023	
---------------	---	---

- a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023
- b. Kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023
- c. Kegiatan Presisi Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023
- d. Dukungan Anggaran Tahun 2023

BAB IV	PENUTUP	
---------------	----------------	---

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

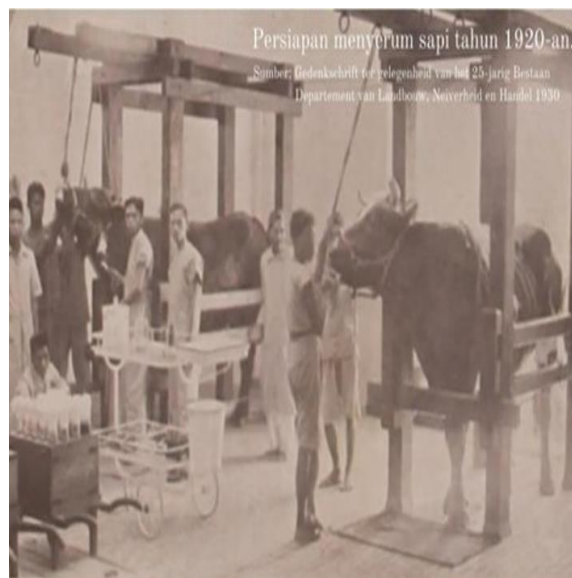
1.1.

Sejarah Peternakan dan Kesehatan Hewan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan, terus berinovasi dari masa ke masa, menyesuaikan dinamika dan perkembangan teknologi, sehingga populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan nasional tetap terjaga optimal.

Sejarah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diawali dengan mulai tergerakannya pemerintah Hindia Belanda mengurus bidang peternakan dengan melakukan pendataan terhadap ternak sapi, kerbau dan domba di daerah koloninya ini pada tahun 1778.

Setelah pemerintah Belanda mengambil kendali kekuasaan di Nusantara dari VOC, Pemerintah Hindia Belanda melakukan sejumlah langkah untuk mengembangkan peternakan. Pada Tahun 1806 Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan sapi Benggala dari India untuk keperluan perkebunan tebu di Indonesia.



Selanjutnya, pemeliharaan kesehatan hewan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemerintah Belanda baik ternak kuda yang dipergunakan oleh pasukan militer maupun ternak sapi sebagai sumber tenaga kerja dan susu, didatangkanlah Dokter Hewan yang pertama ke Indonesia yakni Drh. R.A. Coppickers pada tahun 1820. Kemudian pada **tanggal 26 Agustus 1836** ada ketetapan yang diterbitkan secara resmi oleh Pemerintah melalui plakat (selebaran/pengumuman) tentang larangan pemotongan sapi betina produktif. Hal ini merupakan awal campur tangan pemerintah terhadap peternakan dan kesehatan hewan. Tanggal inilah yang kemudian dijadikan **Hari Lahir Peternakan dan Kesehatan Hewan**.

Walaupun kegiatan pengembangan peternakan sudah dimulai sejak zaman VOC akan tetapi **pembentukan Jawatan Kehewan baru terjadi pada tahun 1841** dengan nama *Veeartsenijkundige Dienst (VD)* di bawah Departemen Dalam Negeri. Instansi Jawatan Kehewan ini merupakan embrio yang terus berkembang dan berkali-kali ganti nama, yang pada akhirnya saat ini menjadi institusi yang disebut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1.2.

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

“Terwujudnya peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern”

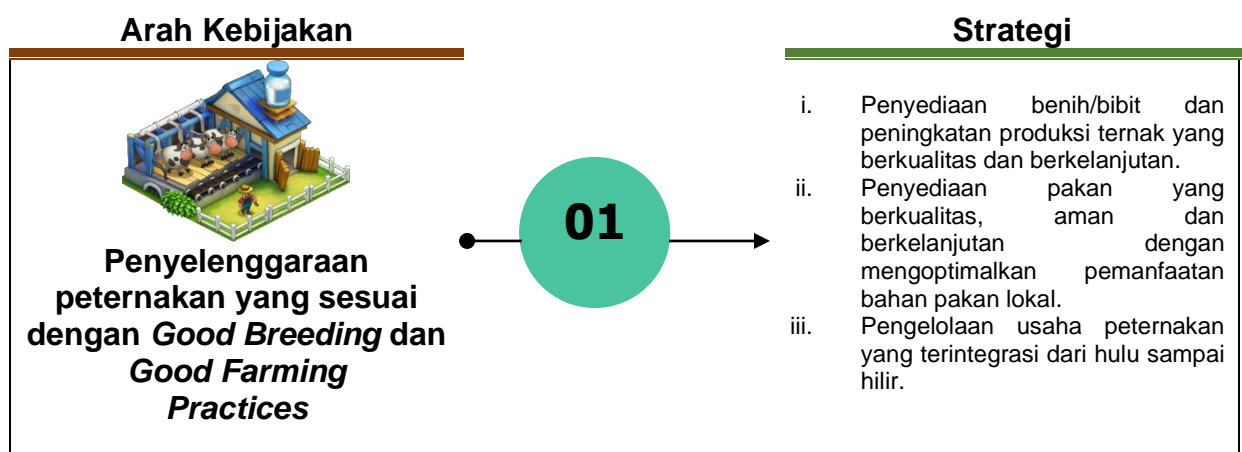
Visi

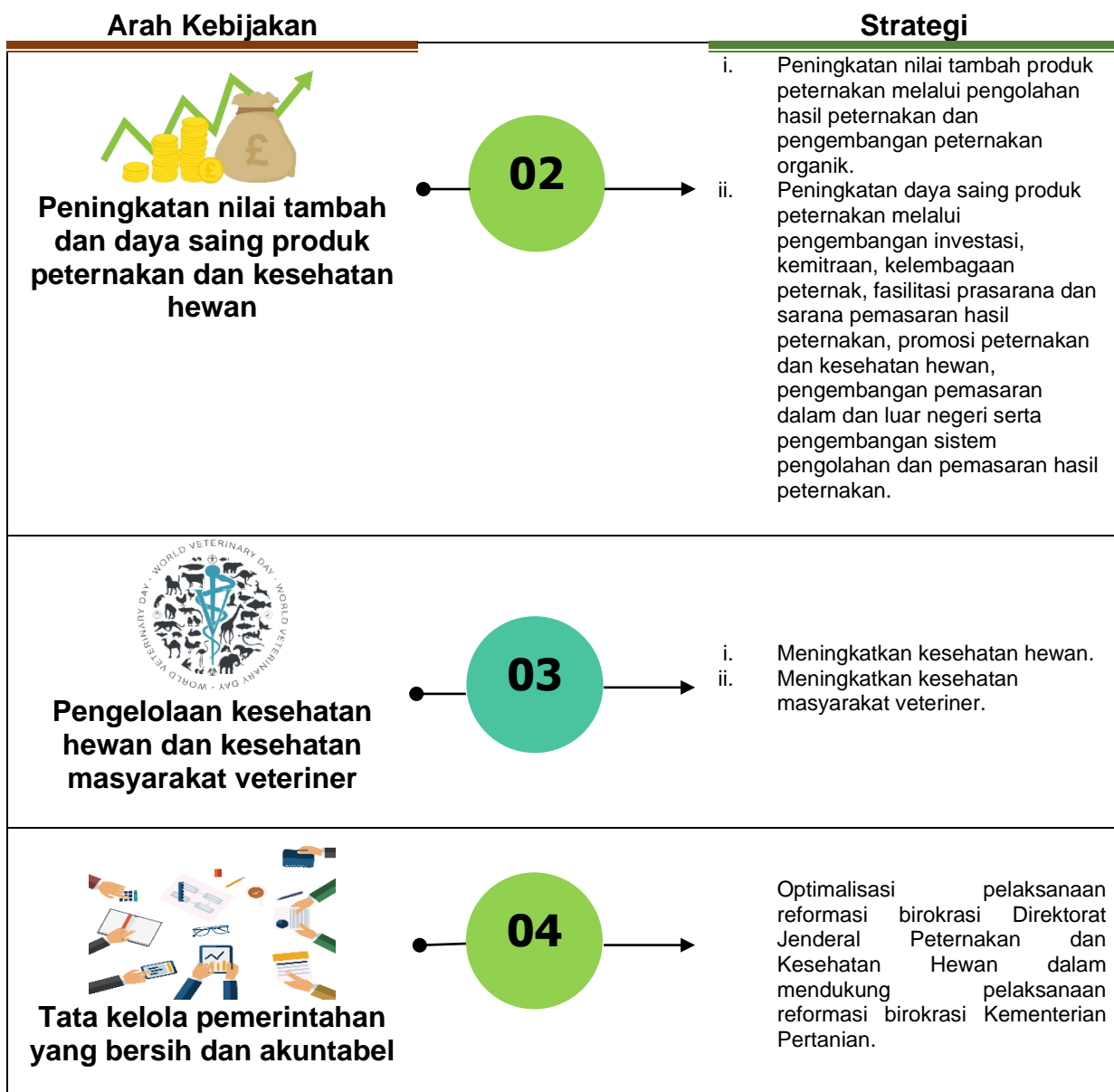
- | | | |
|--|---|------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan benih/bibit dan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan 5. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing 6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi profesional dan modern | Misi |
|--|---|------|

1.3.

Arah Kebijakan dan Strategi
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:





Sumber : Rencana Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Revisi 2, 2021.

1.4.

Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

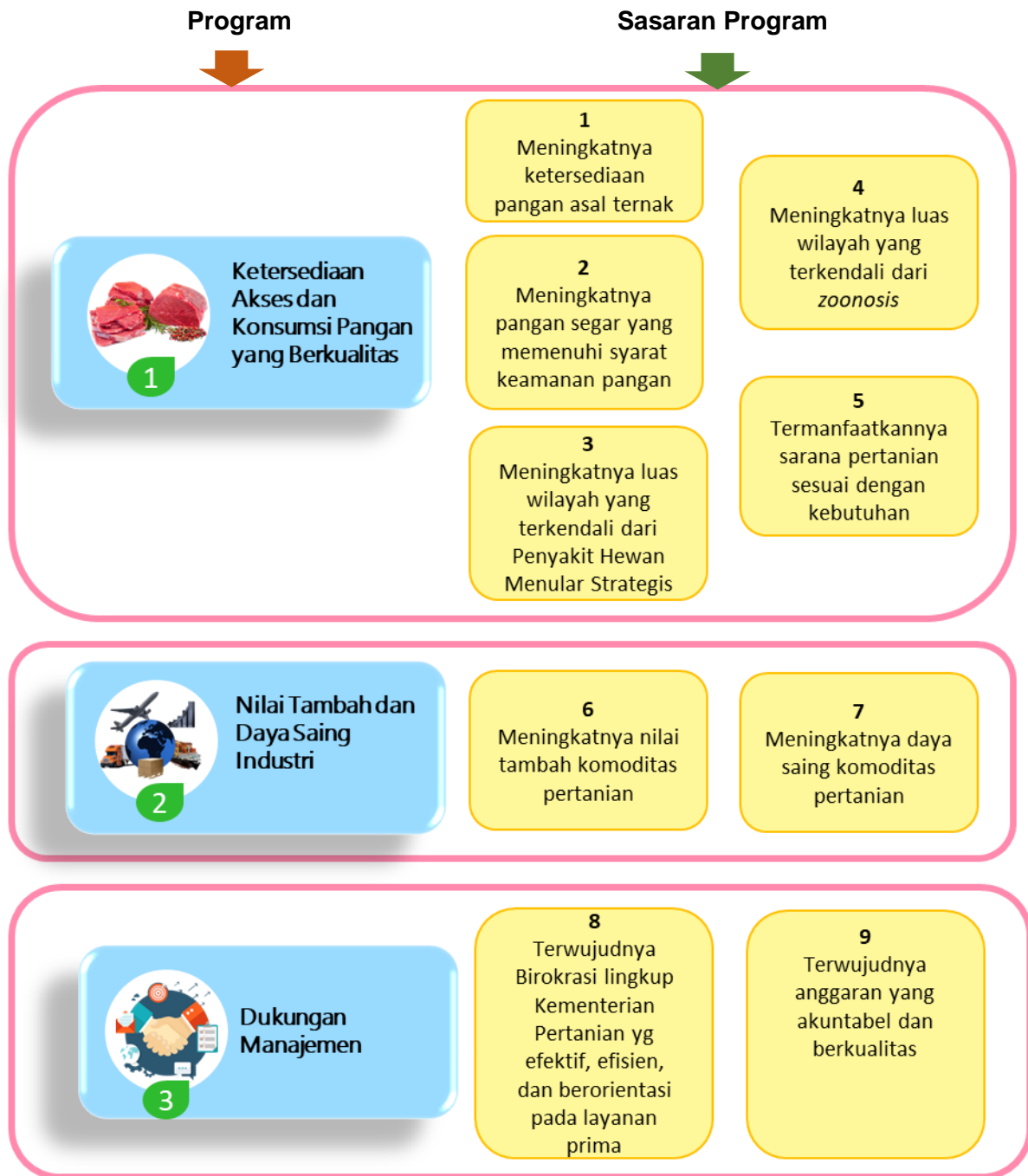
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana terurai diatas, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:



Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diimplementasikan dalam 3 (tiga) program yang berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada tahun 2020, sebagai barometer capaian kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan periode 2020 – 2024.



Sumber : Rencana Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Revisi 2, 2022

1.5.

Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan pada setiap Unit Kerja meliputi:

Peningkatan Produksi Pakan Ternak

1. Hijauan Pakan Ternak **26** unit
2. Pakan Olahan dan Bahan Pakan **5.662** unit
3. Mutu dan Keamanan Pakan **5.050** produk

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

1. Ternak yang Diganti/Diberikan Bantuan **15.000** ekor
2. Pelayanan Kesehatan Hewan **11.946.491** layanan
3. Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik **1** layanan
4. Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan **1.650** produk
5. Pengamatan & Identifikasi Penyakit Hewan **456.514** sampel
6. Sarana Bidang Kesehatan Hewan **3** sampel

Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak

1. Ternak yang Didata dan Ditandai **19.821.549** unit
2. Benih Ternak Unggul **5.551.024** produk
3. Bibit Ternak Unggul **1.611.328** produk
4. Optimalisasi Reproduksi **3.000.000** ekor
5. Ternak Ruminansia Perah **270** ekor
6. Ternak Ruminansia Potong **26.040** ekor
7. Ternak Unggas dan Aneka Ternak **452.220** ekor
8. Sarana Balai Perbibitan Ternak **13** unit
9. Sarana SBSN *Bull Center* Indrapuri **1** unit
10. SBSN Sarana Main Farm Pembibitan Sapi Perah Nasional Manggala **1** unit
11. SBSN Sarana Sentra Unit Pembibitan Ternak Kerbau Nasional Siborongborong **1** unit
12. SBSN Prasarana Main Farm Pembibitan Sapi Perah Nasional Manggala **1** unit
13. SBSN Prasarana Sentra Unit Pembibitan Ternak Kerbau Nasional Siborong-Borong **1** unit

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Sertifikasi Unit Usaha **140** lembaga
2. Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan **910** orang
3. Mutu dan Keamanan Produk Hewan **20.550** produk
4. Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner **8** unit
5. Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner **2** unit

Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

1. Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor **35** lembaga
2. Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan **28** unit
3. Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan **27** unit

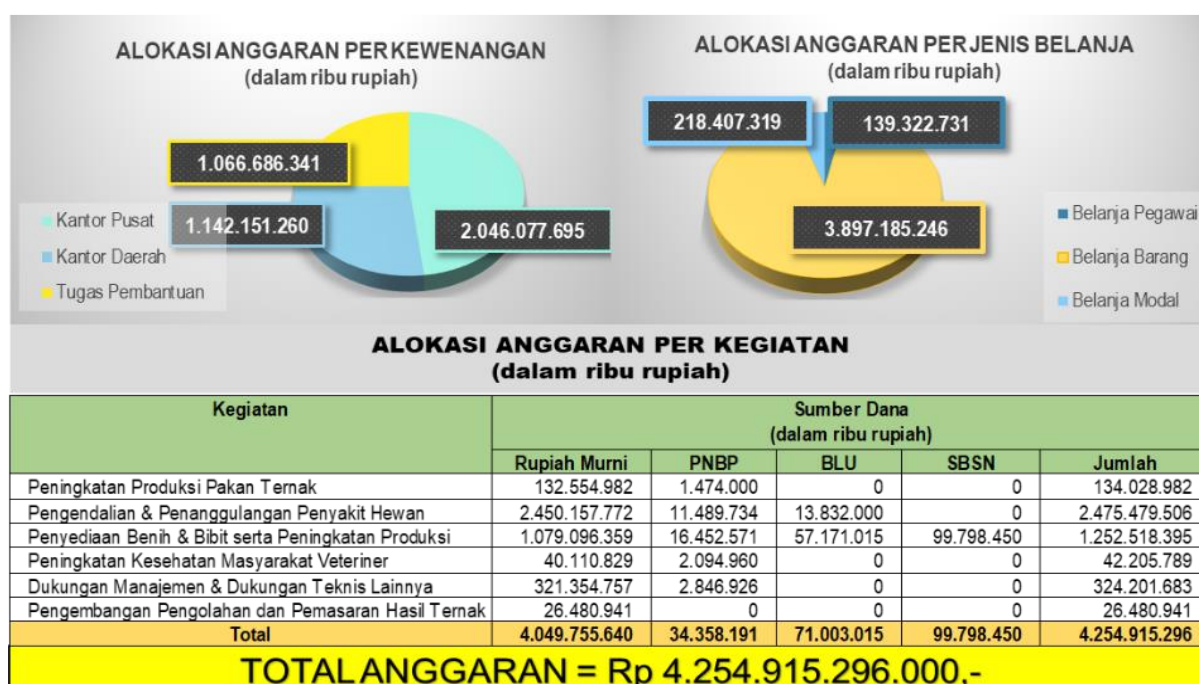
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

1. Layanan BMN **225** ^{Layanan}
2. Layanan Hukum **1** ^{Layanan}
3. Layanan Hubungan Masyarakat **57** ^{Layanan}
4. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal **1** ^{Layanan}
5. Layanan Umum **2** ^{Layanan}
6. Layanan Data dan Informasi **35** ^{Layanan}
7. Layanan Perkantoran **34** ^{Layanan}
8. Layanan Sarana Internal **25** ^{Layanan}
9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran **57** ^{Layanan}
10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi **56** ^{Layanan}
11. Layanan Manajemen Keuangan **57** ^{layanan}

1.6.

Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dukungan anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada T.A. 2022 dialokasikan pada 1 (satu) satuan kerja Kantor Pusat, 22 (dua puluh dua) satuan kerja Kantor Daerah dan 34 (tiga puluh empat) satuan kerja Tugas Pembantuan Provinsi. Selama tahun 2022, Ditjen PKH telah melakukan 12 (dua belas) kali revisi DIPA dengan pagu akhir anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.254.915.296.000,00 (*empat trilyun dua ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).



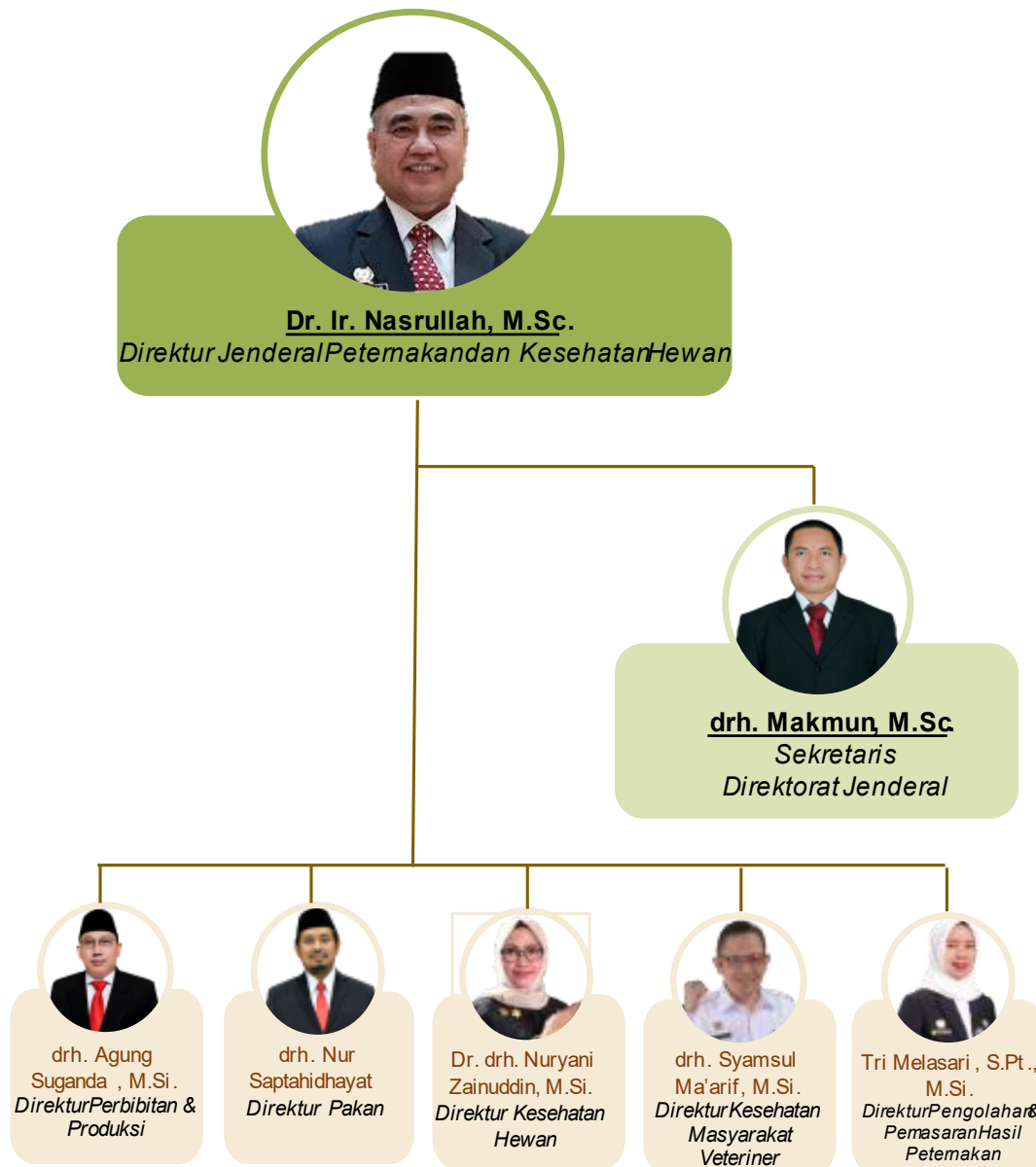
Grafik 1 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 31 Desember 20

1.7.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja unit kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dijabarkan melalui unit-unit kerja Eselon II mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pasal 154, dengan susunan organisasi terdiri atas:

- Sekretariat Direktorat Jenderal.
- Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
- Direktorat Pakan
- Direktorat Kesehatan Hewan.
- Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

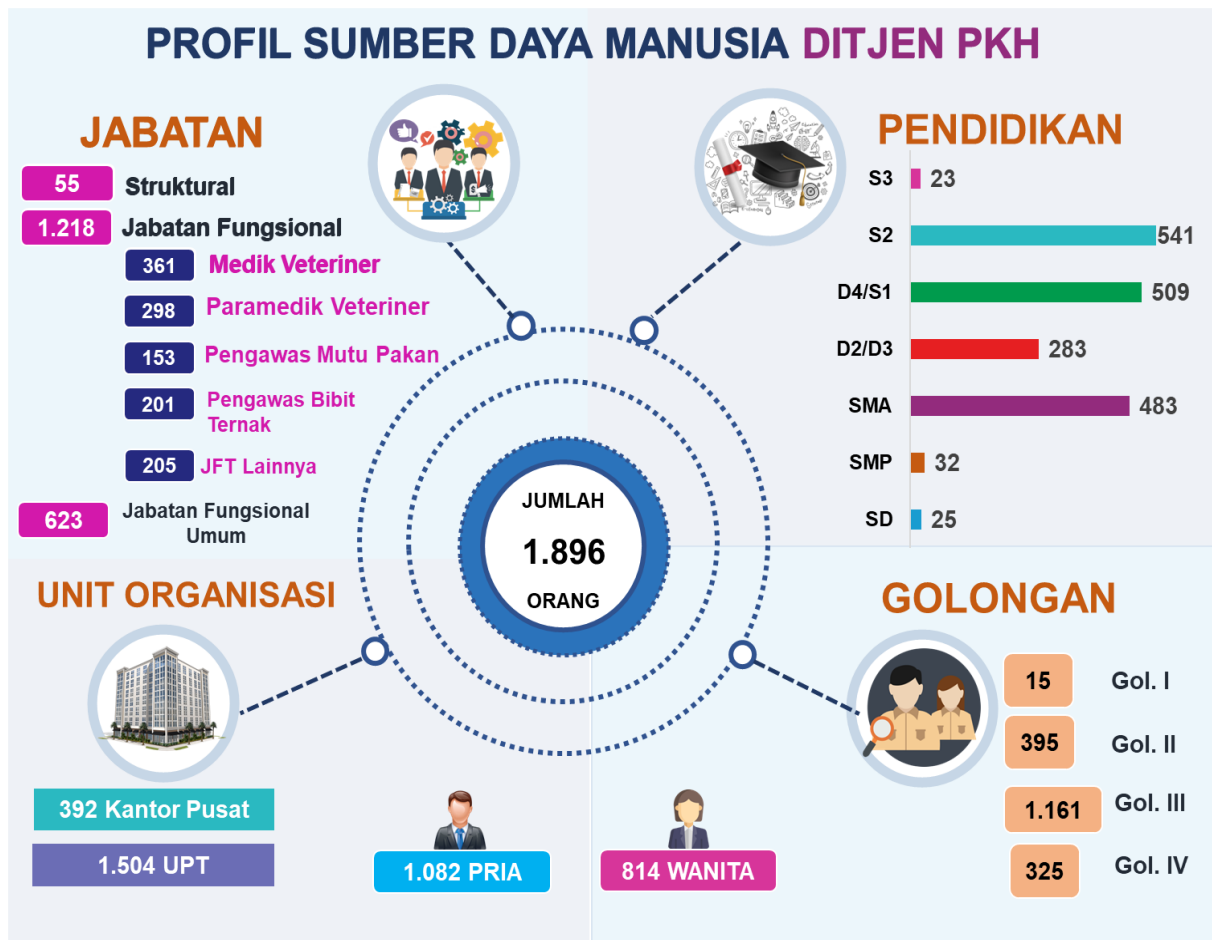


Sumber: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 31 Desember 2022

1.8.

Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam rangka mendukung kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang Maju, Mandiri dan Modern, jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan per 31 Desember 2022 sebanyak 1.896 orang dengan rincian komposisi sebagaimana tersaji pada infografis dibawah ini:



Sumber: SIM ASN, 31 Desember 2022



BAB II

KINERJA MAKRO

PETERNAKAN

2.1.

Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan 2010

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.



Perkembangan PDB atas dasar harga konstan tahun 2020-2022** (*c to c*) menunjukkan tren positif, baik Sektor Pertanian maupun Subsektor Peternakan dengan rata-rata pertumbuhan PDB Sektor Pertanian sebesar 1,73% dan Subsektor Peternakan sebesar 3,28%.

- Kontribusi Subsektor Peternakan pada PDB perlu didorong khususnya dalam budidaya ternak domba dan kambing melalui korporasi peternakan terintegrasi model kluster.
- Tujuan pengembangan korporasi peternakan kambing/domba terintegrasi model kluster antara lain:
 - Memenuhi kebutuhan pangan sebagai sumber protein alternatif bagi masyarakat.
 - Menggerakkan ekonomi pedesaan, korporasi peternakan rakyat, membangun peternakan berbasis budaya, serta menjaga ketahanan ibadah.
 - Dalam kaitannya ternak domba kambing dengan ketahanan ibadah, salah satunya terletak pada tradisi akikah yang dilakukan umat muslim. Pangsa pasar industri akikah sendiri tercatat sebanyak 909 ribu ekor per tahun atau mencapai sebesar 14,28% dari potensi pasar akikah di Indonesia.
 - Penjualan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha juga turut berkontribusi. Pada 2022, konsumsi ternak kambing/domba untuk kepentingan kurban tercatat sebanyak 1.066.029 ekor, dimana 70,93% kambing dan domba 29,07%.

PROSPEK 2023**BERPELUANG**

berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia seiring membaiknya proses bisnis pascapenghapusan PPKM.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pascapenghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

2.2.

Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Peternakan

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dunia maka kebutuhan akan pangan hewani, produk peternakan dan kesehatan hewan akan terus meningkat. Demikian juga persaingan antar produsen komoditas peternakan dan kesehatan hewan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian termasuk peternakan dan kesehatan hewan, menuju Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.

Perkembangan ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan dari waktu ke waktu menunjukkan tren yang positif, baik dari sisi nilai maupun volume. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam pencapaiannya, antara lain:

- ◆ Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia sejak bulan April 2022 yang berdampak pada pembatasan pemasukan hewan rentan PMK di Malaysia dan Brunei Darussalam sehingga pada tahun 2022 nilai ekspor biri-biri (domba) mengalami penurunan sebesar 72,67% dan nilai ekspor kambing menurun 87,13% dibanding tahun 2021.
- ◆ Masih adanya proses *G to G* yang belum selesai dengan beberapa negara tujuan ekspor.
- ◆ Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dan keamanan produk hewan dari negara tujuan seringkali menjadi hambatan dalam menembus pasar global.

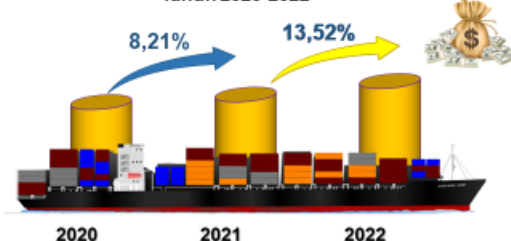
Dalam menghadapi kendala peningkatan daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis antara lain:

- Mendorong pertumbuhan eksportir baru, dengan cara menyiapkan unit usaha dan memberikan pembekalan kepada pelaku usaha agar siap ekspor.
- Menambah ragam komoditas ekspor dengan cara: mendorong varian komoditas ekspor termasuk dari bahan setengah jadi menjadi dalam bentuk jadi, kerja sama dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* untuk menggali potensi daerah, serta mendorong tumbuhnya investasi di bidang industri agribisnis.
- Menambah negara mitra dagang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, KBRI sebagai Perwakilan Negara Indonesia, termasuk diaspora Indonesia di negara tujuan ekspor serta memanfaatkan berbagai forum perundingan dan kerja sama baik bilateral, regional, maupun multilateral. Pada tahun 2022 negara yang menjadi target mitra dagang baru yakni Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar.

- Meningkatkan volume ekspor dengan cara koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, dan para *stakeholder* termasuk para pelaku usaha ekspor untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor kuantitas, kualitas dan kontinuitas (3K).
- Meningkatkan frekuensi pengiriman melalui kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan rekomendasi untuk ekspor di lingkup Ditjen peternakan dan Kesehatan Hewan.

PERKEMBANGAN EKSPOR KOMODITAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2020-2022

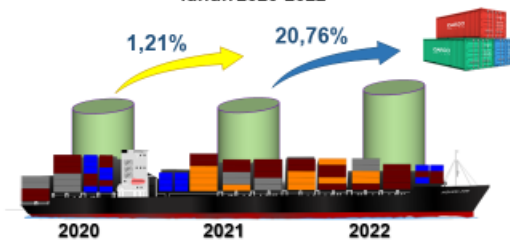
Perkembangan Nilai Ekspor Subsektor Peternakan Tahun 2020-2022



KELOMPOK KOMODITAS	2020	2021	2022
	NILAI (USD 000)	NILAI (USD 000)	NILAI (USD 000)
HEWAN HIDUP	80.407	61.871	63.393
PRODUK PANGAN	733.756	747.911	767.689
PRODUK NON PANGAN	133.207	167.778	188.909
OBAT HEWAN	16.685	65.205	162.979
BIBIT DAN BENIH	598	1.057	1.940
TOTAL	964.653	1.043.822	1.184.910

Keterangan: Angka Tetap bulan Desember 2022

Perkembangan Volume Ekspor Subsektor Peternakan Tahun 2020-2022



KELOMPOK KOMODITAS	2020	2021	2022
	VOLUME (TON)	VOLUME (TON)	VOLUME (TON)
HEWAN HIDUP	33.148	25.760	25.224
PRODUK PANGAN	174.873	172.241	131.312
PRODUK NON PANGAN	116.485	130.045	117.610
OBAT HEWAN	908	1.286	122.847
BIBIT DAN BENIH	28	58	776
TOTAL	325.443	329.390	397.769

Sumber: BPS, diolah Pusdatin dan Dit. PPHNak, 2023

2.3.

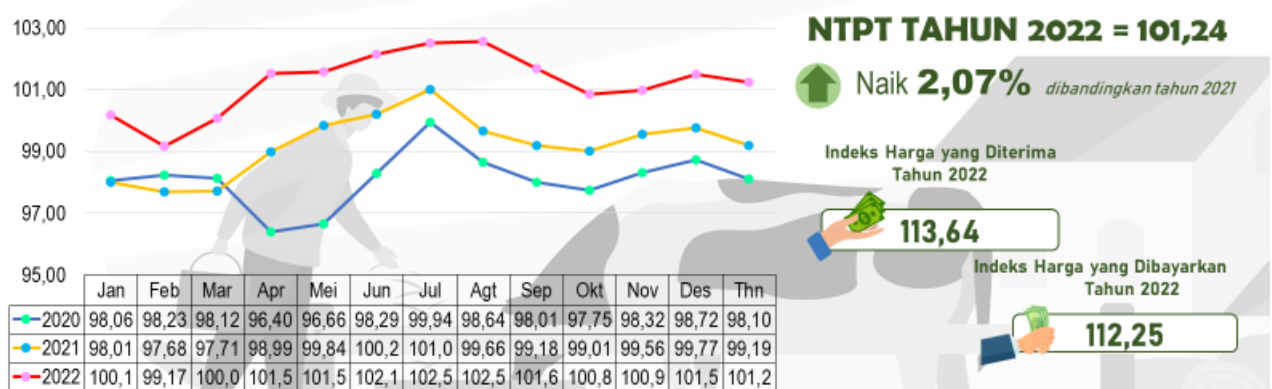
Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)

Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) merupakan proksi kesejahteraan petani peternak yang diperoleh dengan cara membandingkan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Dengan demikian, terdapat indikasi bahwa semakin tinggi NTPT, maka relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani peternak.

- ◆ Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) tahun 2022 sebesar 101,24 dan tahun 2021 sebesar 99,19 sehingga mengalami kenaikan sebesar 2,07% (*y on y*) jika dibandingkan tahun 2021.
- ◆ NTPT cukup berfluktuasi setiap bulannya selama tahun 2022. Kenaikan tertinggi pada bulan April 2022 sebesar 1,44% sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2022 sebesar -1,02%.
- ◆ Pada bulan Desember 2022 terjadi kenaikan NTPT sebesar 0,51%. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 1,17%, lebih tinggi dari peningkatan Ib sebesar 0,66%.

- ◆ Peningkatan It bulan Desember 2022 disebabkan oleh naiknya harga berbagai komoditas pada semua kelompok penyusun Subsektor Peternakan, yaitu kelompok ternak besar sebesar 0,18%, kelompok ternak kecil sebesar 0,30%, kelompok unggas sebesar 2,08%, dan kelompok hasil ternak sebesar 2,69 %.
- ◆ Komoditas yang menyebabkan kenaikan It terbesar pada Subsektor Peternakan adalah ayam ras pedaging dan telur ayam ras.
- ◆ Kenaikan Ib sebesar 0,66% disebabkan oleh kenaikan Indeks Kelompok Konsumsi Rumah Tangga (KRT) sebesar 1,07% dan Indeks Kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebesar 0,34%.
- ◆ Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan NTPT antara lain: (i) meningkatkan produksi komoditas peternakan, khususnya pangan asal ternak untuk pemenuhan dalam negeri dan tujuan ekspor; (ii) menggandeng para pelaku usaha untuk berkolaborasi dan berinvestasi dalam bidang peternakan; (iii) menurunkan biaya produksi seperti biaya pakan dengan mengembangkan pakan alternatif dan mendekatkan sumber pakan dengan lokasi peternakan; (iv) meningkatkan akses pasar dan distribusi produk peternakan dengan maksimalisasi sistem rantai dingin, hilirisasi nilai tambah, penetapan harga acuan, pembentukan korporasi peternakan dan fasilitasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI PETERNAKAN (NTPT) TAHUN 2020 - 2022 (tahun dasar 2018 = 100)



Sumber: BPS, 2023.

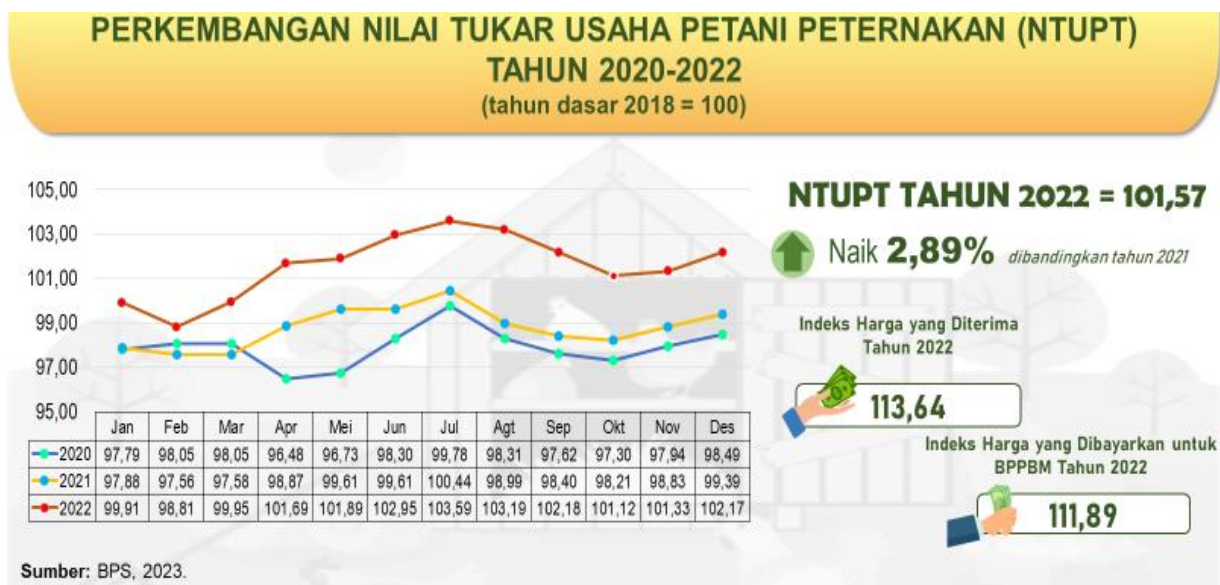
2.4.

Nilai Tukar Usaha Petani Peternakan (NTUPT)

Nilai Tukar Usaha Petani Peternak (NTUPT) menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan biaya produksi (profitabilitas) yang diukur dengan cara membandingkan Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (Ib BPPBM).

- ◆ Nilai Tukar Usaha Petani Peternakan (NTUPT) tahun 2022 sebesar 101,57 dan tahun 2021 sebesar 98,72, sehingga mengalami kenaikan sebesar 2,89% (*y on y*) jika dibandingkan tahun 2021.

- ◆ NTUPT cukup berfluktuasi setiap bulannya selama tahun 2022. Kenaikan tertinggi pada bulan April 2022 sebesar 1,74% sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2022 sebesar -1,10%.
- ◆ Pada bulan Desember 2022 terjadi kenaikan NTUPT sebesar 0,83%. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 1,17%, lebih tinggi dari peningkatan Ib BPPBM sebesar 0,34%.
- ◆ Peningkatan It bulan Desember 2022 disebabkan oleh naiknya harga berbagai komoditas pada semua kelompok penyusun Subsektor Peternakan, yaitu kelompok ternak besar sebesar 0,18%, kelompok ternak kecil sebesar 0,30%, kelompok unggas sebesar 2,08%, dan kelompok hasil ternak sebesar 2,69 %.
- ◆ Komoditas yang menyebabkan kenaikan It terbesar pada Subsektor Peternakan adalah ayam ras pedaging dan telur ayam ras.
- ◆ Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan NTPT antara lain: (i) meningkatkan produksi komoditas peternakan, khususnya pangan asal ternak untuk pemenuhan dalam negeri dan tujuan ekspor; (ii) menggandeng para pelaku usaha untuk berkolaborasi dan berinvestasi dalam bidang peternakan baik PMA maupun PMDN; (iii) menurunkan biaya produksi seperti biaya pakan dengan mengembangkan pakan alternatif dan mendekatkan sumber pakan dengan lokasi peternakan; (iv) meningkatkan akses pasar dan distribusi produk peternakan dengan maksimalisasi sistem rantai dingin, hilirisasi nilai tambah, penetapan harga acuan, pembentukan korporasi peternakan dan fasilitasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).



2.5.

Investasi Subsektor Peternakan

Investasi subsektor peternakan terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Perkembangan realisasi investasi subsektor peternakan

periode 2020-2022 berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah diolah adalah sebagai berikut:



Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

- Nilai PMDN mengalami peningkatan rata-rata tahunan sebesar 55,29% selama periode 2019-2021.
- Realisasi investasi PMDN subsektor peternakan pada tahun 2021 sebesar Rp 2,14 Triliun atau menurun 6,34% dibanding tahun 2020.
- Investasi pada bidang usaha peternakan babi tahun 2021 mengalami peningkatan tertinggi sebesar 176,96% dibanding tahun 2020.
- Investasi pada bidang usaha peternakan kambing dan domba tahun 2021 mengalami penurunan terbesar senilai 54,37% dibanding tahun 2020.
- Realisasi investasi PMDN tertinggi tahun 2021 pada bidang usaha peternakan unggas sebesar Rp 1,82 Triliyun (85,28%).
- Realisasi investasi PMDN terendah tahun 2021 pada bidang usaha peternakan kambing dan domba sebesar Rp 979,3 juta (0,05%).



Penanaman Modal Asing (PMA)

- Nilai PMA mengalami penurunan rata-rata tahunan sebesar 9,05% selama periode 2019-2021.
- Realisasi investasi PMA subsektor peternakan pada tahun 2021 sebesar US\$ 28.556,7 juta atau menurun 35,75% dibanding tahun 2020.
- Investasi pada bidang usaha peternakan sapi dan kerbau tahun 2021 mengalami peningkatan tertinggi sebesar 459,04% dibanding tahun 2020.
- Investasi bidang usaha peternakan unggas tahun 2021 mengalami penurunan terbesar senilai 77,63% dibanding tahun 2020
- Realisasi investasi PMA tertinggi tahun 2021 pada bidang usaha peternakan sapi dan kerbau sebesar US\$ 19.388,7 juta (67,90%).



Total Investasi PMA dan PMDN

- Nilai investasi subsektor peternakan (PMA dan PMDN) mengalami peningkatan rata-rata tahunan sebesar 33,97% selama periode 2019-2021.
- Realisasi investasi subsektor peternakan (PMA dan PMDN) pada tahun 2021 sebesar Rp 2,56 Triliyun atau menurun 12,58% dibanding tahun 2020.
- Penurunan investasi subsektor peternakan tersebut disebabkan penurunan realisasi PMA sebesar 35,75% dan penurunan realisasi PMDN sebesar 6,34% dibanding tahun 2020.

Tabel 1 Realisasi Investasi Subsektor Peternakan Tahun 2019-2021

Bidang Usaha	2019			2020			2021		
	PMA (US\$ ribu)	PMDN (Rp juta)	Total (Rp juta)	PMA (US\$ ribu)	PMDN (Rp juta)	Total (Rp juta)	PMA (US\$ ribu)	PMDN (Rp juta)	Total (Rp juta)
Peternakan Sapi dan Kerbau	9.855,1	174.724,8	322.550,3	3.468,2	109.863,4	159.804,9	19.388,7	228.930,0	512.005,0
Peternakan Babi	-	-	-	-	10.881,0	10.881,0	-	30.136,4	30.136,4
Peternakan Unggas	24.289,8	875.765,9	1.240.112,2	40.975,3	2.160.547,1	2.750.594,7	9.164,6	1.823.977,4	1.957.776,8
Peternakan Domba dan Kambing	1.900,4	2.198,6	30.704,6	-	2.146,2	2.146,3	3,4	979,3	1.029,3
Jasa Penunjang & Peternakan Lainnya	1.733,3	-	26.000,0	-	15,0	15,0	-	54.724,1	54.724,1
Total	37.778,6	1.052.689,3	1.619.367,1	44.443,5	2.283.452,7	2.923.441,9	28.556,7	2.138.747,2	2.555.671,6

Sumber: BKPM data diolah, 2021.

2.6.

Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber: SAKERNAS Agustus Badan Pusat Statistik, data diolah Pusdatin Kementan, 2022.

- ◆ Tenaga kerja pada Subsektor Peternakan tahun 2022 sebanyak 4.484.147 orang atau menurun 9,76% dibanding tahun 2021.
- ◆ Penurunan tenaga kerja tersebut karena
- ◆ Peningkatan tenaga kerja tersebut karena subsektor peternakan tetap dapat bertumbuh positif walaupun sempat berkontraksi pada saat pandemi *Covid 19* dan 28,33% penduduk Indonesia bekerja pada lapangan usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.



BAB III

KINERJA PEMBANGUNAN

PETERNAKAN DAN

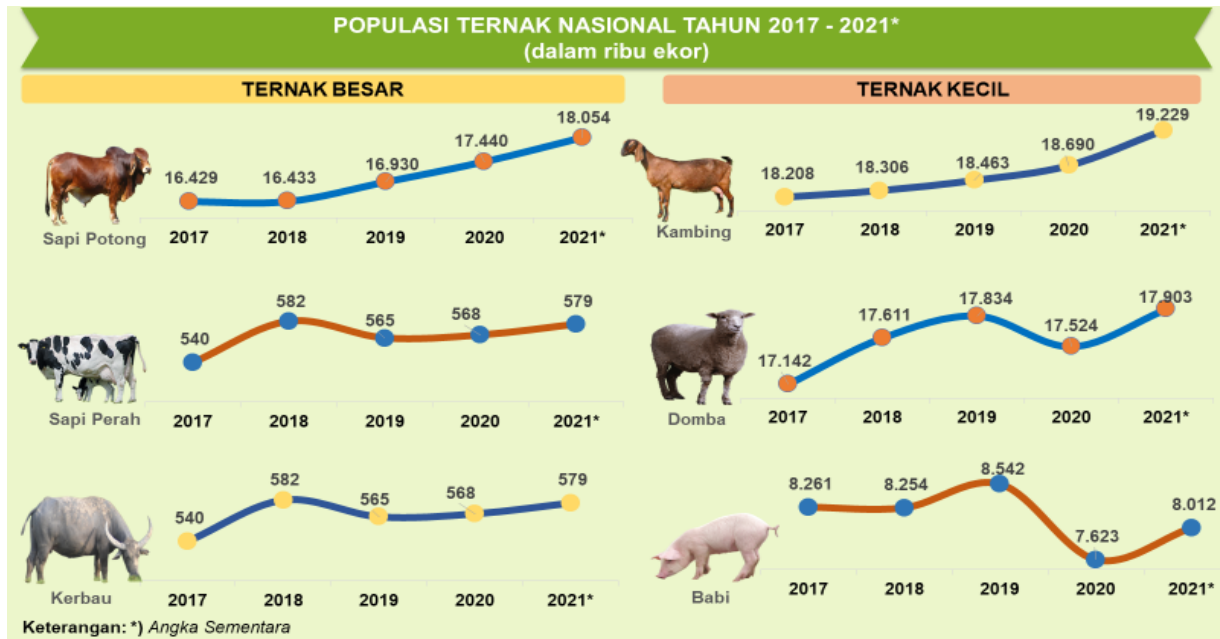
KESEHATAN HEWAN

TAHUN 2022

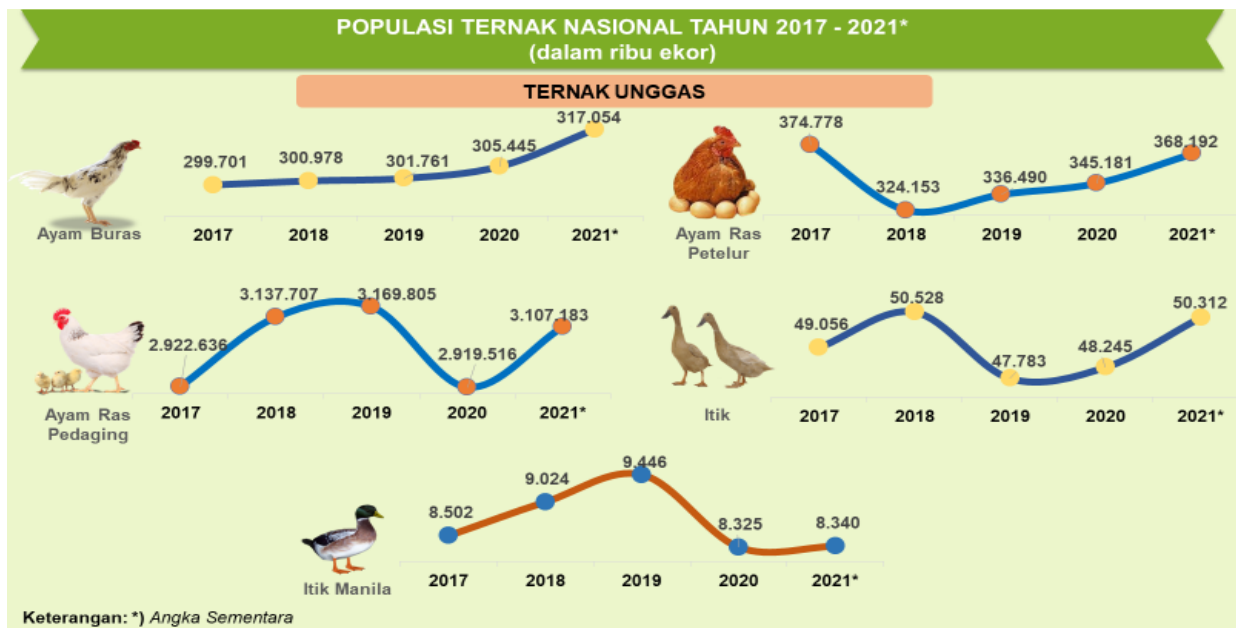
3.1.

Populasi dan Produksi Komoditas Peternakan

Populasi ternak adalah kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu. Berdasarkan jenisnya, ternak dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah dan kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi) dan ternak unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila). Perkembangan populasi ternak nasional periode tahun 2020-2022 sebagaimana tersaji pada infografis di bawah ini.



Sumber: Ditjen PKH, 2021.

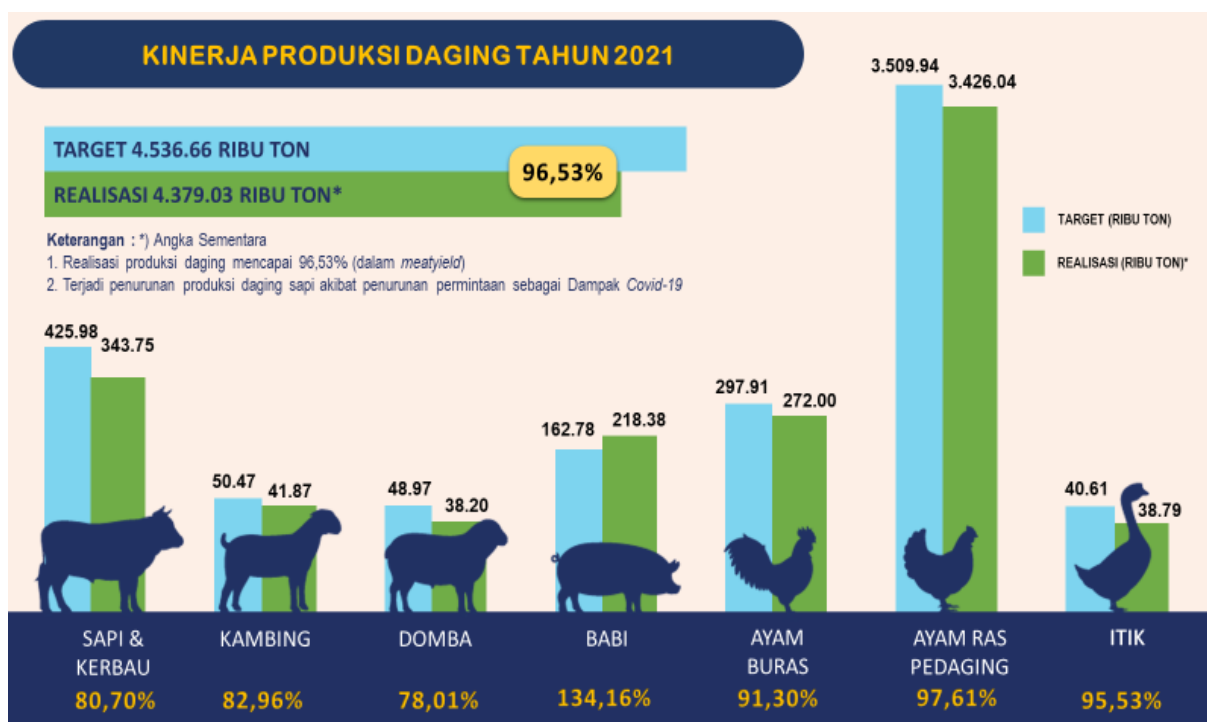


Sumber: Ditjen PKH, 2021.



Sumber: Ditjen PKH, 2021.

Produksi komoditas peternakan tahun 2021 berupa daging (*meatyield*) yang berasal dari sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras pedaging dan itik, susu yang berasal dari sapi perah dan telur yang berasal dari ayam buras, ayam ras petelur, itik, itik manila, dan puyuh.



Sumber: Ditjen PKH data diolah, 2021.

- ◆ Produksi komoditas peternakan pada tahun 2021 mengalami peningkatan antara 0,02%-15,21%, kecuali pada komoditas daging sapi yang mengalami penurunan 3,45%.

- ◆ Penurunan produksi daging sapi sebesar 3,45% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan penurunan jumlah pemotongan yang merupakan dampak penurunan permintaan pada sektor hotel, restoran dan catering (horeka) dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging sapi.

**Tabel 3.1. Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2017-2021*
(dalam ribu ton)**

Komoditas	Tahun (dalam ribu ton)					Persentase Peningkatan 2021/2020 (%)
	2017	2018	2019	2020	2021*)	
Sapi	364,40	373,13	378,25	339,75	328,03	(3,45)
Kerbau	22,01	18,99	18,57	13,88	15,71	13,20
Kambing	47,72	47,59	49,42	41,86	41,87	0,02
Domba	37,69	56,26	47,92	37,05	38,20	3,09
Babi	214,15	145,61	159,42	189,55	218,38	15,21
Ayam Buras	300,13	287,16	292,33	270,21	272,00	0,66
Ayam Ras Pedaging	3.175,85	3.409,56	3.495,09	3.219,12	3.426,04	6,43
Itik	36,39	38,65	39,81	35,75	38,79	8,50
Susu Sapi	928,11	951,00	944,54	946,91	962,68	1,66
Telur	5.216,64	5.267,93	5.354,62	5.874,38	5.926,03	0,88

Keterangan : *) Angka sementara.

Sumber : Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021.

3.2.

Kinerja Peningkatan Produksi Pakan Ternak

Direktorat Pakan melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pakan.

3.3.

Kinerja Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Direktorat Kesehatan Hewan melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan.

3.4.

Kinerja Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak

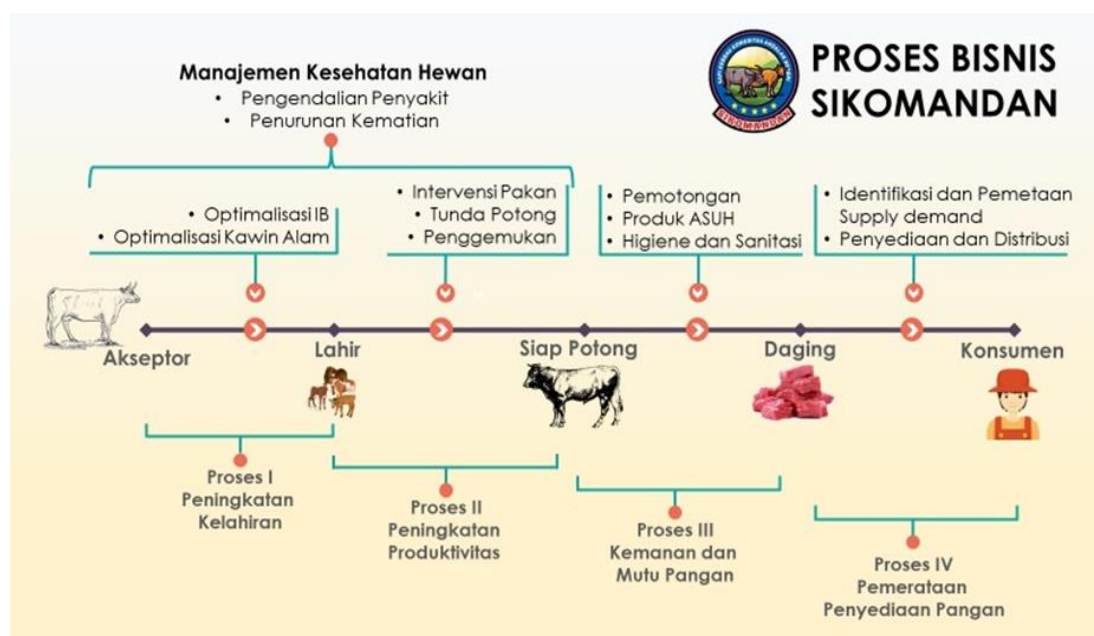
Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan dan produksi ternak.

i. Sapi dan Kerbau Indukan Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN)

Kegiatan SIKOMANDAN merupakan kesinambungan kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dengan cakupan output kegiatan yang diperluas bukan hanya sekedar pada penambahan populasi akan tetapi juga sampai dengan penyediaan produksi dalam

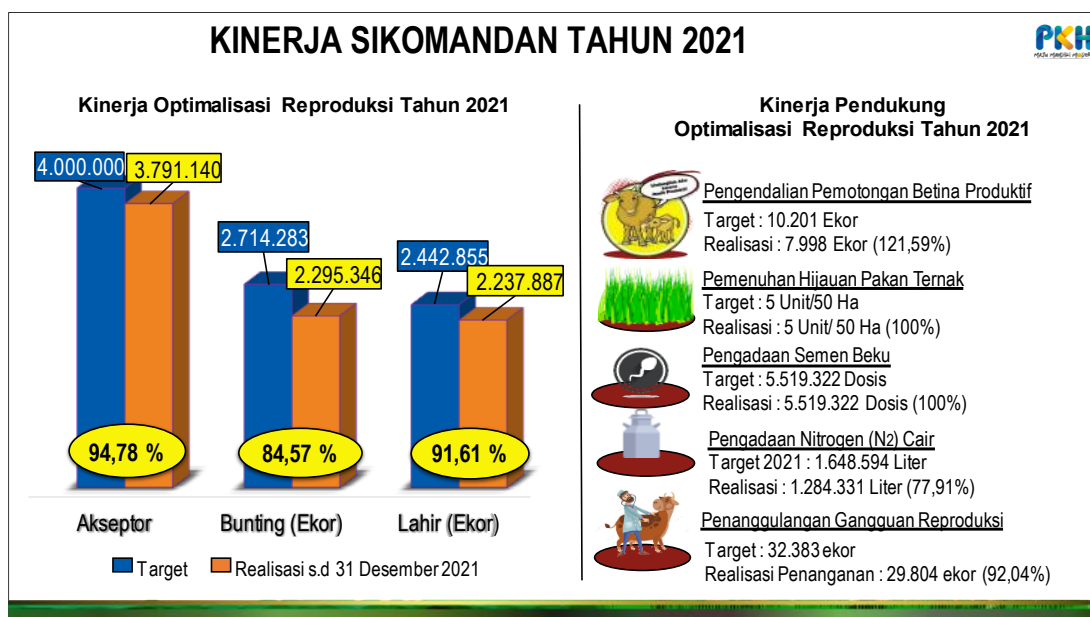
negeri. Oleh karena itu, proses bisnis kegiatan SIKOMANDAN meliputi 4 (empat) proses kegiatan yang terintegrasi dan saling menunjang menjadi satu kesatuan kegiatan yang berkelanjutan.

Adanya pandemi *Covid 19*, kegiatan SIKOMANDAN difokuskan pada proses bisnis pertama yaitu peningkatan kelahiran melalui Optimalisasi Reproduksi karena hampir semua input proses bisnis dialihkan untuk penanganan pandemi. Proses bisnis pertama “*Proses Bisnis Peningkatan Kelahiran*” meliputi identifikasi akseptor, pelayanan perkawinan IB, pemeriksaan kebuntingan dan pelaporan kelahiran. Untuk menunjang kegiatan tersebut penyediaan input bahan (Semen Beku, N2 cair, Kontainer, dan Bahan Lainnya) dan biaya operasional (BOP dan insentif pelaporan) disiapkan baik melalui anggaran APBN maupun APBD. Untuk menjamin keberhasilan, pada kegiatan ini juga didukung dengan kegiatan pengendalian penyakit termasuk penanganan gangguan reproduksi serta pemberian vitamin dan pengobatan untuk menekan angka kematian.



Sumber: Ditjen PKH, 2021

Capaian kinerja optimalisasi reproduksi pada tahun 2021 sebanyak 3.791.140 Akseptor (94,78%) dari target 4.000.000 akseptor. Kebuntingan sebanyak 2.295.346 ekor (84,57%) dari target 2.714.283 ekor dan Kelahiran sebanyak 2.237.887 ekor (91,61%) dari target 2.442.855 ekor. Total kelahiran ternak pada tahun 2020-2021 melalui Optimalisasi Reproduksi sebanyak 4.538.617 ekor.



Sumber: Ditjen PKH, 2021.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pendukung SIKOMANDAN melalui Optimalisasi Reproduksi adalah sebagai berikut:

i. *Pengadaan Semen Beku*

Semen beku yang digunakan dalam SIKOMANDAN adalah yang ber SNI atau telah melakukan uji laboratorium berkala yang terstandar. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa semen beku yang beredar di masyarakat harus terjamin kualitasnya sehingga tidak merugikan peternak sebagai produsen. Produsen semen beku yang sudah memenuhi persyaratan tersebut adalah adalah BBIB Singosari, BIB Lembang, BIBD Tuah Sakato, BIBD Riau, BIBD Bengkulu, UPTD IB Ciamis, BIBD Ungaran, BIBD Denpasar, BIBD D.I. Yogyakarta, BIBD Banjarbaru, BIBD Sulawesi Selatan dan BIBD Banyumulek.

Berdasarkan rekapitulasi kontrak pengadaan semen beku selama tahun 2021 secara nasional sudah terealisasi sebanyak 5.519.322 dosis (100,00%) dan terdistribusi sebanyak 5.493.079 dosis.

ii. *Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak*

Dalam mendukung pencapaian produksi daging, maka pada tahun 2021 telah dilakukan fasilitasi pengembangan Hijauan Pakan Sapi Potong, melalui kegiatan penanaman dan pengembangan tanaman pakan berkualitas di 5 provinsi seluas 50 Ha, yang terdiri dari 1) Provinsi Jawa Barat seluas 10 Ha; 2) Lampung 10 Ha; 3) Banten 10 Ha; 4) Jawa Timur 10 Ha; dan 5) Nusa Tenggara Barat seluas 10 Ha.

Jenis hijauan yang ditanam adalah rumput gajah, rumput odot dan indigofera, dengan estimasi produksi Hijauan Pakan berkualitas hasil dari penanaman tersebut dapat memenuhi kebutuhan pakan sapi potong 500 ekor, selain dari kebutuhan pakan konsentrat. Diharapkan dengan stimulus kegiatan penanaman hijauan pakan berkualitas dapat meningkatkan kesadaran peternak dalam upaya penyediaan hijauan pakan berkualitas dan

berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak ruminansia khususnya sapi.

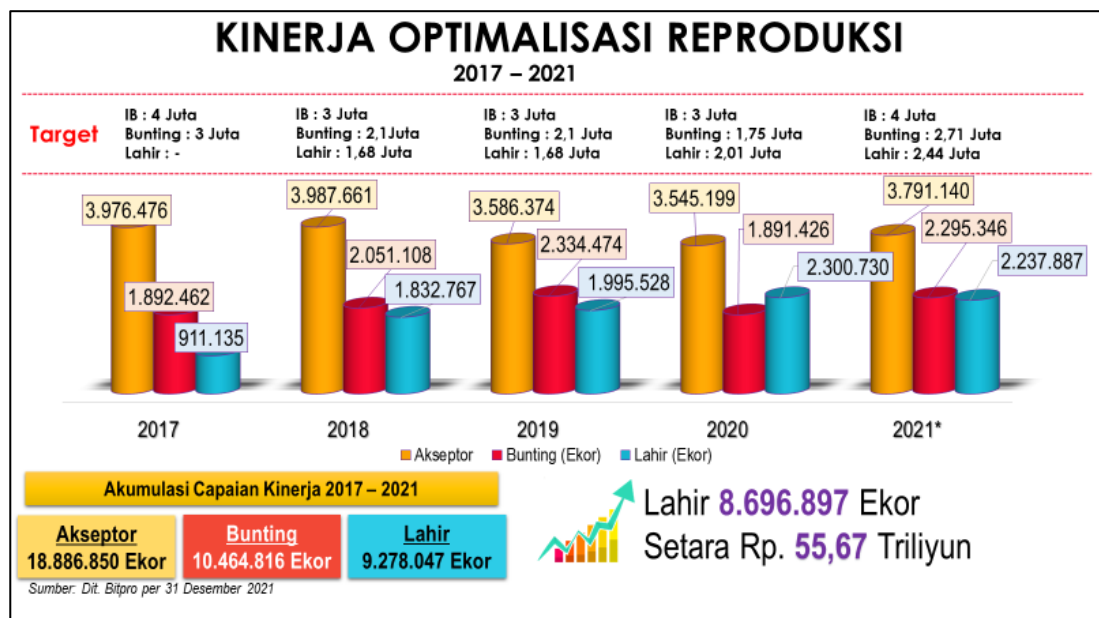
iii. *Penanganan Gangguan Reproduksi*

Penanganan Gangguan Reproduksi memiliki peran penting dalam dukungan keberhasilan peningkatan populasi. Melalui penanganan gangguan reproduksi, sapi/kerbau dapat memiliki siklus reproduksi normal dan produksi optimal. Target penanganan kasus gangguan reproduksi pada tahun 2021 sejumlah 32.383 ekor dan realisasi yang ditangani sebanyak 29.804 ekor oleh BBVet/BVet yang tersebar di 7 regional.

iv. *Pengendalian Pemotongan Betina Produktif*

Pengendalian pemotongan betina produktif bertujuan untuk mencegah pemotongan sapi/kerbau betina produktif yang masih banyak terjadi di Rumah Potong Hewan (RPH). Betina produktif merupakan mesin produksi sapi/kerbau yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, pemotongannya harus dikendalikan, sehingga sapi betina yang dapat diselamatkan tersebut akan mempertahankan keberadaan akseptor pelaksanaan SIKOMANDAN.

Pada tahun 2021 total ternak betina yang masuk ke RPH sebanyak 185.309 ekor, dengan rincian sebanyak 175.108 (94,50%) merupakan ternak betina tidak produktif dan 10.201 ekor (5,50%) ternak betina produktif. Dari 10.201 ekor ternak betina produktif tersebut, sebanyak 7.998 ekor (121,59%) dilakukan pemotongan dan sebanyak 2.203 ekor (21,60%) berhasil ditolak untuk dipotong/berhasil dikendalikan.



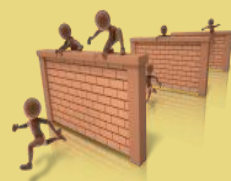
Sumber: Ditjen PKH, 2021

Kendala dan upaya tindak lanjut dalam pelaksanaan Optimalisasi Reproduksi pada kegiatan SIKOMANDAN T.A. 2021 adalah sebagai berikut:


i. SK Petugas *Recorder* dan Tim Teknis dari kabupaten masih terdapat perubahan, sehingga realisasi capaian kinerja fisik dan keuangan belum optimal.


ii. Penyampaian laporan secara *realtime* oleh petugas tidak berjalan optimal.

iii. Dukungan anggaran yang semakin terbatas terutama APBN dengan target akseptor semakin meningkat.



KENDALA





TINDAK LANJUT

i. Pengadaan sarana dan prasarana optimalisasi reproduksi serta pembayaran BOP IB dan Kelahiran lebih dikonsentrasikan pada kabupaten yg lebih intensif.

ii. Mendorong kesadaran dan ketaatan petugas dalam menyampaikan laporan.

iii. Optimalisasi sumber anggaran selain APBN yakni APBD III untuk mendukung kegiatan seperti pengadaan hormon untuk gertak birahi dan IB secara massal.

Penandaan dan Pendataan Ternak

1. Tahun 2022 telah dialokasikan kegiatan penandaan dan pendataan ternak dalam rangka penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK). Dasar pelaksanaan penandaan dan pendataan ternak tahun 2022 adalah Kepmentan nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) dan Petunjuk Teknis nomor 9621/KPTS/TI.040/F/09/2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan T.A 2022.
2. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penandaan dan pendataan ternak tahun 2022 sebesar Rp 408.877.666.000 yang bersumber dari anggaran reguler dan ABT PEN PMK Realisasi aktual anggaran per tanggal 6 Januari 2023 sebesar Rp 375.386.027.375 (91,81%) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Target anggaran pengadaan Eartag Secure QR Code sebesar Rp 297.323.235.000 (19.821.549 unit) dengan realisasi anggaran 100%;
 - b. Target anggaran pengadaan Aplikator sebesar Rp 11.512.670.000 (29.108 unit) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.239.043.520 (88,93%);
 - c. Target anggaran operasional Penandaan dan Pendataan Ternak sebesar Rp 88.967.960.000 (4.448.398 ekor) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 57.619.380.000(64,76%)
 - d. Target anggaran koordinasi, sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, distribusi dan honor rekorder sebesar Rp 11.079.801.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.210.368.855 (92,15%)
3. Kegiatan penandaan dan pendataan ternak tahun 2022 dilaksanakan terdiri dari pengadaan eartag secure QR Code, pengadaan aplikator, biaya operasional (BOP) penandaan dan pendataan ternak, bimtek petugas penandaan dan pendataan ternak, honor rekorder, koordinasi dan monitoring.

Pengadaan eartag secure QR Code tahap I dilaksanakan oleh satker Ditjen PKH dan dialokasikan di 23/provinsi sebanyak 14.821.819 unit realisasi 100%, selanjutnya tahap II diadakan pengadaan eartag secure QR Code untuk (11) provinsi sebanyak 4.762.400 unit terealisasi 100%, sehingga total pengadaan eartag secure QR Code terealisasi sebanyak 19.821.549 unit (100%). Pengadaan aplikator tahap dilaksanakan oleh satker OPD di 23 provinsi sebanyak 19.616 unit realisasi 100%, tahap II pengadaan aplikator sebanyak 9.416 unit dilaksanakan oleh satker Ditjen PKH terealisasi 100%, sehingga total pengadaan aplikator sebanyak 29.032 unit.

4. Sebelum dilakukan penandaan dan pendataan ternak, telah dilakukan sosialisasi Kepmentan 559 tahun 2022 dan bimbingan teknis aplikasi Identik PKH di 29 Provinsi oleh Tim Penandaan dan Pendataan Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Tim Peruri kepada petugas Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, petugas Koperasi dan Perusahaan Peternakan.
5. Pelaksanaan penandaan dan pendataan ternak dilaksanakan oleh petugas penandaan ternak terdiri dari unsur Pemerintah Pusat (Ditjen PKH), Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, TNI/Polri, Perguruan Tinggi dan unsur lainnya. Petugas penandaan dan Pendataan Ternak ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten. Selanjutnya diregistrasi oleh Tim Ditjen PKH dan diberikan username dan password agar bisa mengakses aplikasi Identik PKH dan menginput data sapi dan kerbau pada aplikasi tersebut.
6. Total penandaan dan pendataan ternak yang telah diinput ke aplikasi identik PKH di 29 Provinsi sampai tanggal 31 Desember 2022 jam 23.59 sebanyak 2.886.440 ekor yang terdiri dari sapi perah 319.576 ekor, sapi potong 2.520.441 ekor, kerbau 40.975 ekor, kambing 3.422 ekor, domba 1.717 ekor, babi 309 ekor
7. Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan penandaan dan pendataan ternak adalah : (1) peternak menolak pemasangan eartag pada ternaknya, (2) keterbatasan jaringan internet, (3) terbatasnya jumlah aplikator, (4) jumlah petugas penandaan terbatas, (5) sulit memasang eartag pada ternak yang dipelihara secara ekstensif di padang penggembalaan dan kebun sawit
8. Tindak lanjut yang telah dilakukan adalah dukungan regulasi dan kebijakan secara tertulis (mandatory) antara lain : (1) SE Dirjen PKH 12/SE/PK.300/F/10/2022 tentang Percepatan Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak, SE Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 28663/KR.120/11/2022,(2)Menggunakan beberapa provider internet atau mencarilokasiterdekatyangmemiliki sinyal internet, (3) Sosialisasi penandaan dan pendataan kepada asosiasi pedagang sapi, tokoh masyarakat baik melalui social media maupun media massa lainnya, (4) Menambah petugas penandaan dan pendataan ternak dengan melibatkan babinsa/babinkamtibmas, penyuluh pertanian, petugas mandiri dan relawan desa, (5) Mengoptimalkan dan membuat fasilitas seperti kandang jepit sederhana

ii. Pengembangan Itik pada *Food Estate*

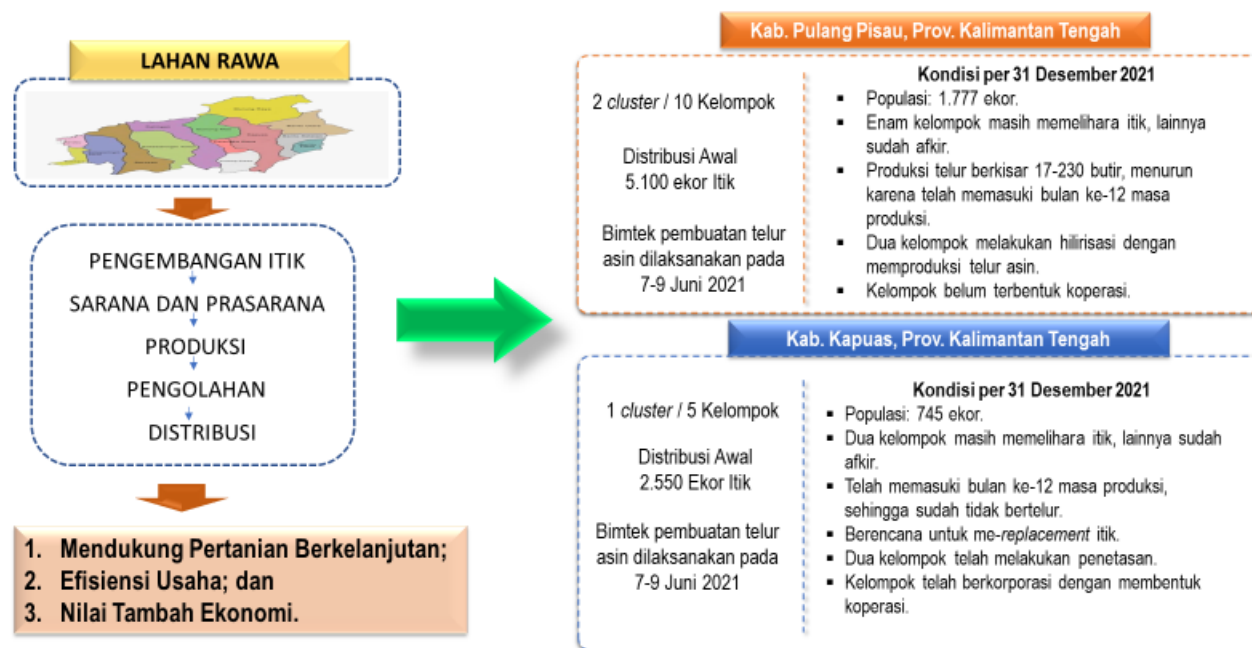
Food Estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN)/*Major Project* 2020-2024 yang diamanatkan kepada Kementerian Pertanian untuk penguatan lumbung pangan, dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis global, antara lain: masa pandemi COVID-19 dan peringatan musim kemarau, ancaman krisis pangan, ketersediaan pangan bagi 273 juta penduduk, dan pembatasan dalam produksi ekspor pangan global sebagaimana diamanatkan

Kegiatan Pengembangan Itik di area *Food Estate* telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021 dan 2022. Pengembangan Itik di area *food estate* pada tahun 2020 dan 2021 dilakukan di beberapa lokasi yaitu Prov. Kalimantan Tengah (Kab. Pulang Pisau dan Kab. Kapuas), Nusa Tenggara Timur (Kab. Sumba Tengah), Sumatera Utara (Humbang Hasundutan). Pada tahun 2022, mulai dilakukan rintisan di Prov. Sulawesi Selatan (Kab. Gowa), Jawa Tengah (Kab. Temanggung), D.I. Yogyakarta (Kab. Bantul) dengan komoditas itik serta Prov. Nusa Tenggara Timur (Kab. Belu), Prov. Jawa Tengah (Kab. Temanggung, Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar), Prov. DKI Jakarta (Kota Administratif Jakarta Utara) dengan komoditas ayam.

Food Estate dikembangkan dengan pendekatan kawasan yang berupaya dilakukan secara terintegrasi dan berdaya saing mencakup komoditas pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan yang dilakukan melalui mekanisasi, modernisasi pertanian dan sistem digitalisasi sehingga mampu melakukan hilirisasi produksi pertanian sebagai industri dengan mengkorporasikan petani.

di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabuapten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Food estate di Kab. Pulang Pisau dilakukan pada 2 (dua) cluster dengan masing-masing 5 kelompok dan 1 (satu) cluster dengan 5 kelompok di Kab. Kapuas. Itik yang didistribusikan sebanyak 7.650 ekor yang terdiri dari 7.500 ekor betina dan 150 ekor jantan. Jumlah itik kegiatan food estate tahun 2020 pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 2.522 ekor yang terdiri dari 2.488 ekor betina dan 34 ekor jantan.

Grafik 2. Kondisi Pengembangan Itik pada Kegiatan *Food Estate* T.A. 2020 per 31 Desember 2021







Sumber : Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021.

Aspek peternakan pada Food Estate Aspek tahun 2021 berupa bantuan ternak itik dan sarana prasarana pendukung yaitu bantuan uang pembuatan kandang dan bantuan pakan yang dilaksanakan di (i) Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara; (ii) Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur; (iii) Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Sebagai informasi, kekurangan bantuan itik di Kab. Sumba Tengah, Prov. NTT sebanyak 1.642 ekor (8%) disebabkan itik mengalami kematian saat pendistribusian terakhir dan penyedia barang akan melakukan penggantian. Kendala lainnya pelaksanaan food estate di Kab. Sumba Tengah, Prov. NTT adalah penurunan produktivitas itik dalam bertelur karena kualitas pakan yang diberikan. Itik mampu bertelur 30-60 butir saat diberikan pakan konsentrat, tetapi saat bantuan pakan konsentrat habis dan pakan diganti dengan dedak padi, itik tidak lagi bertelur. Hal tersebut disebabkan harga pakan konsentrat itik di Kab. Sumba Tengah cukup mahal yaitu berkisar antara Rp 11.000,- s.d. Rp 12.000,-. Sebagai upaya tindak lanjut guna mendukung food estate maka akan dibangun pabrik makan mini di lokasi pengembangan food estate agar pemenuhan pakan berkualitas dengan harga terjangkau tercukupi.

Selanjutnya, kekurangan bantuan itik di Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah sebanyak 2.500 ekor (10%) akan diselesaikan pada tanggal 7 Januari 2022. Pendistribusian itik pada lokasi pengembangan terkendala musim hujan dan kondisi jalan yang rusak berat.

Tabel 4. Realisasi Pengembangan Itik pada Food Estate T.A. 2021

		Prov. Sumatera Utara	Prov. NTT	Prov. Kalimantan Tengah		
		Kab. Humbang Hasundutan	Kab. Sumba Tengah	Kab. Pulang Pisau	Kab. Kapuas	
	Jumlah Kelompok (Kelompok Masyarakat)	Target	20	41	48	48
	Realisasi		20	41	48	48
	%		100	100	100	100
	Bantuan Pembuatan Kandang (dalam ribu Rp)	Target	420.000	933.812	1.008.000	1.008.000
	Realisasi		420.000	933.812	1.008.000	1.008.000
	%		100	100	100	100
	Bantuan Pakan (Kg)	Target	40.000	120.450	96.000	96.000
	Realisasi		40.000	120.450	96.000	96.000
	%		100	100	100	100
	Bantuan Itik (ekor)	Target	10.000	20.500	24.000	24.000
	Realisasi		10.000	18.858	24.000	21.500
	%		100	92	100	90

Sumber : Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021.

iii. Pengembangan Proyek SBSN *Bull Treatment Centre Unit* Indrapuri

SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valutas asing. Kementerian Pertanian melalui Satker BPTU-HPT Indrapuri pada tahun 2021 memperoleh alokasi SBSN sebagai sumber pendanaan atas proyek pembangunan Unit Perlakuan Pejantan Sapi Aceh (*Bull Treatment Unit*) senilai Rp 19,2 Milyar.

Bull Treatment Unit adalah unit perlakuan pejantan Sapi Aceh berupa pusat produksi dan pengembangan pejantan Sapi Aceh yang bersertifikat sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam strategi perbaikan dan peningkatan mutu genetik. Tujuan pembangunan *Bull Treatment Unit* adalah sebagai berikut:

Pembangunan *Bull Treatment Unit* meliputi pembangunan sarana-prasarana dan infrastruktur pendukung dalam produksi bibit pejantan unggul Sapi Aceh. Produksi bibit unggul di *Bull Treatment Unit* dimulai dari kandidat pejantan setelah keluar dari *Rearing Unit* sampai menjadi *Bull* siap pakai untuk produksi semen beku dan pemacek ke masyarakat petani peternak, instansi terkait dan *stakeholder* baik lokal maupun nasional.

Alokasi dan realisasi serapan anggaran SBSN *Bull Treatment Unit* pada tahun 2021 tercantum pada Tabel 5 dengan realisasi serapan sebesar 97,38%. Optimalisasi sisa dana SBSN yang dilanjutkan kembali pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 448.450.000,- dengan target penyelesaian optimalisasi sisa dana pada bulan Februari 2022, sehingga target serapan akhir SBSN sebesar 99,72%. Optimalisasi sisa dana dialokasikan untuk penyelesaian pengadaan *hay baller*.

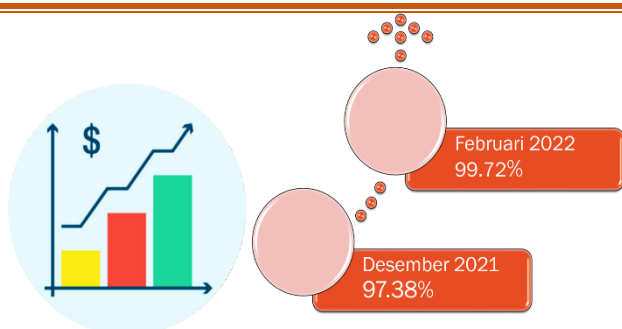
Tabel 5. Capaian Kinerja Proyek SBSN *Bull Treatment Unit*

Kegiatan	Sumber Dana (dalam ribu rupiah)					

Sumber : Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, data diolah, 2021.

Pengadaan *hay baller* yang melewati batas akhir tahun kegiatan terkendala dalam pengiriman barang akibat pandemi COVID-19 karena barang yang diadakan merupakan barang impor. Upaya tindak lanjut atas kendala tersebut yaitu (i) koordinasi intensif dengan pihak distributor dan penyedia barang; (ii) Pemberian kesempatan pada penyedia barang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Target Penyelesaian Sisa Dana SBSN



Keterangan:

1. Realisasi per 31 Desember 2021: Rp 18.697.344.989,- (97,38%)
2. Target serapan akhir SBSN: Rp 19.145.794.989,- (99,72%)

Optimalisasi Sisa Dana SBSN



Pengadaan Hay Baller

Keterangan: gambar hanya sebagai ilustrasi

3.5.

Kinerja Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner

3.6.

Kinerja Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

iv. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Subsektor Peternakan

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi pemberdayaan petani dilakukan antara lain melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan. Fasilitas pembiayaan usaha peternakan terutama dilakukan melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN.

Melalui program KUR pemerintah memberikan subsidi bunga kepada individu/badan usaha/keompok usaha yang produktif, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

v. Desa Korporasi Sapi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Perintah Menteri pertanian Nomor 112/KP.040/M/07/2021 tanggal 13 Juli 2022, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan jaminan penguatan untuk membentuk korporasi melalui Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengembangan Sapi Bakalan dan sapi Indukan dalam rangka pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi petani yang diaplikasikan di 9 (sembilan) provinsi pada tahun 2021. Program ini telah bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024.



Gambar 3.1. Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono foto bersama usai menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten PPU dan perwakilan Kementan RI di Desa Labangka Barat, Kaltim, Selasa (19/4/2022).

Realisasi serapan KUR Subsektor Peternakan tahun 2021 sebesar **Rp 15,54 Triliun** dari target Rp 15,06 Triliun atau mencapai **103,18%**



No	SEKTOR USAHA (KBLI LBU*)	DEBITUR	AKAD KREDIT (Rp)
1	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	247.224	7.887.172.487.391
2	Pembibitan dan Budidaya Unggas	68.188	3.250.444.318.171
3	Pembibitan dan Budidaya Kambing/ Domba	80.898	2.040.709.011.663
4	Pembibitan dan Budidaya Ternak Perah	36.333	1.448.800.852.430
5	Pembibitan dan Budidaya Ternak Babi	29.703	910.632.375.008
	TOTAL	462.346	15.537.759.044.591

Atas pencapaian KUR sektor pertanian yang melebihi target tersebut, tanggal 18 Januari 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memberikan Penghargaan KUR 2021 kepada Kementerian Pertanian.



Sumber: Sakura (Sistem Informasi KUR Pertanian, Ditjen PSP) diolah Ditjen PKH
*) KBLI LBU: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Laporan Bank Umum

3.7.

Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

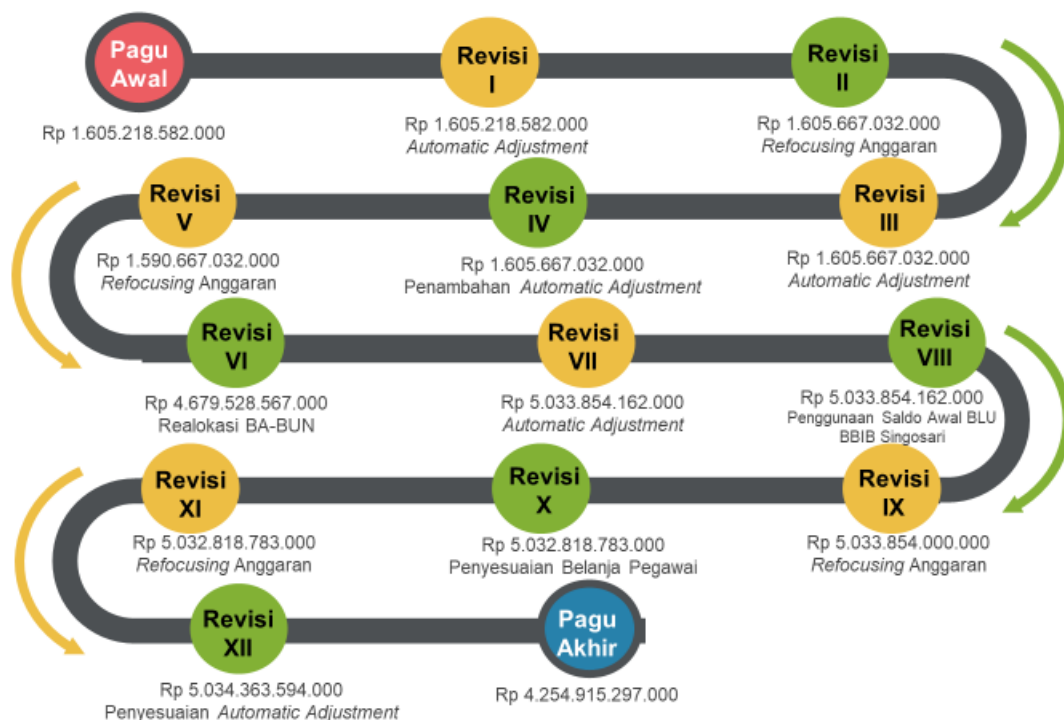
Sekretariat Direktorat Jenderal melaksanakan tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi layanan Barang Milik Negara (BMN), layanan Hukum, layanan Hubungan Masyarakat, layanan Organisasi dan Tata Kelola Internak, layanan Umum, layanan Data dan Informasi, layanan Perkantoran dan

Sarana Internal, layanan Perencanaan dan Penganggaran, layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan layanan Manajemen Keuangan.

3.8.

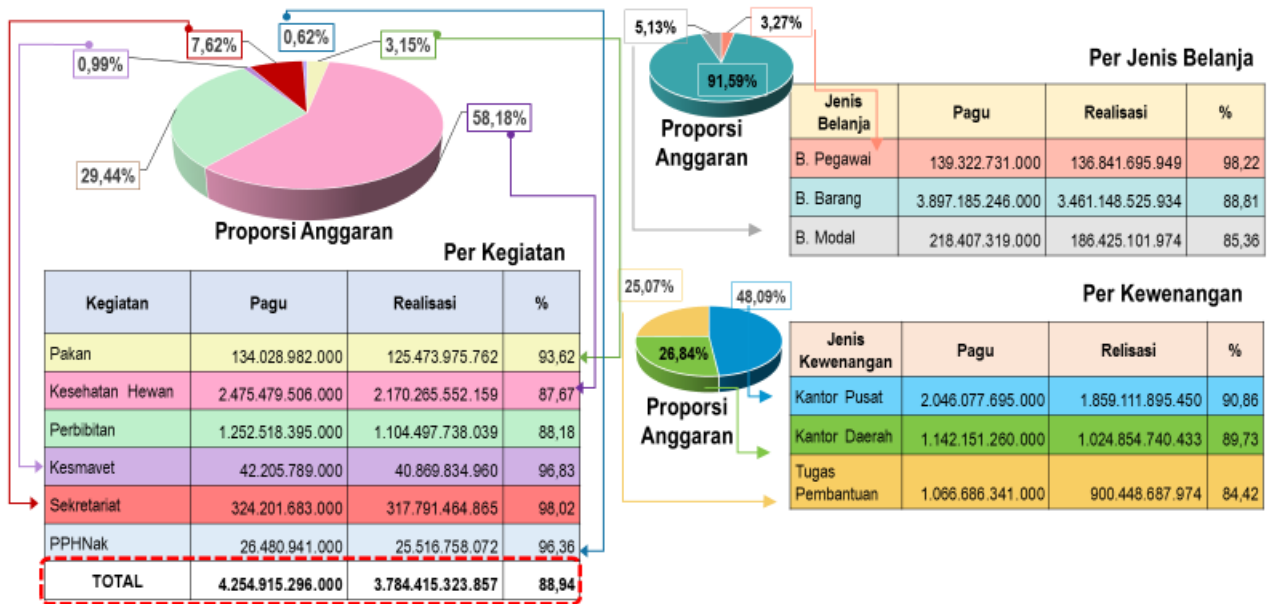
Kinerja Anggaran Tahun 2022

Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia masih memberlakukan kebijakan penanganan pandemi *Covid-19* yang berdampak pada perekonomian nasional antara lain: (i) menyediakan paket stimulus pemulihan ekonomi; (ii) menetapkan kebijakan padat karya di kementerian dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain hal tersebut, dunia peternakan dan kesehatan hewan Indonesia pada bulan Mei 2022 mengalami wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan berkuku belah yang juga berdampak pada perekonomian peternakan nasional. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan penyesuaian program dan kegiatan, utamanya dalam rangka penanggulangan dan pengendalian PMK. Untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2022, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memperoleh alokasi anggaran akhir senilai Rp 4.254.915.297.000,- (*empat triliyun dua ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dengan dinamika penganggaran sebagaimana tersaji pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2 Dinamika Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2022

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan 31 Desember tahun 2022 senilai Rp 3.784.415.323.857 (*tiga triliun tujuh ratus delapan puluh empat milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*) atau senilai 88,94 persen.



Sumber: Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan

Gambar 3 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2022

3.9.

Penghargaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Sepanjang Tahun 2022

Selain kinerja yang telah diuraikan sebelumnya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2022 juga memperoleh penghargaan dan apresiasi sebagai berikut:

a. Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian



Kementerian Pertanian melaksanakan pemeringkatan keterbukaan informasi publik tingkat unit kerja/ UPT tahun 2022. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan hasil pemeringkatan sebagai berikut:

- i. Kategori Eselon I
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memperoleh peringkat ke I dan juga kategori khusus sebagai Unit Kerja dengan Inovasi Pelayanan Informasi Publik Terbaik.
- ii. Kategori Eselon II
Pusat Veteriner Farma Surabaya memperoleh peringkat ke I; Balai Besar Veteriner Wates peringkat ke II; Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari peringkat ke IV; dan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden.
- iii. Kategori Eselon III
Balai Embrio Ternak Cipelang memperoleh peringkat ke II; Balai Inseminasi Buatan Lembang peringkat ke VII; dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan peringkat ke X.

b. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkelanjutan telah memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada tahun 2022. Sertifikasi ISO telah diperoleh sejak tahun 2018 dengan upaya untuk mempertahankan sertifikasi tersebut antara lain pelatihan audit, penyesuaian pada dokumen dan formulir yang ada, pelaksanaan audit internal, dan rapat tinjauan manajemen.



c. SNI Award Tahun 2022 Peringkat Perak oleh Balai Embrio Ternak Cipelang

Balai Embrio Ternak Cipelang kembali menorehkan prestasi dalam penerapan SNI untuk produk yang dihasilkan pada acara SNI Award Tahun 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2022 di Gedung B.J. Habibie, BRIN.

Penghargaan SNI Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada organisasi yang secara konsisten menerapkan SNI untuk produk dan jasa yang dihasilkan. penerapan SNI memberikan jaminan kualitas kepada masyarakat selain jaminan keamanan,



keselamatan dan meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional.

Pada SNI Award ke 17, Balai Embrio Ternak Cipelang merupakan satu-satunya organisasi kecil barang yang mendapatkan penghargaan SNI Award Peringkat Perak diantara 12 organisasi pemenang Peringkat Perak SNI Award Tahun 2022. Balai Embrio Ternak Cipelang dapat bersanding bersama dengan organisasi besar dan organisasi pendidikan tinggi lainnya.



BAB IV
PROGRAM/KEGIATAN
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2023

4.1.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023

Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan, sehingga pada tahun 2023 arah kebijakan, program dan target Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tersaji sebagaimana infografis di bawah ini:



4.2.

Kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023

Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2023 melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu (i) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (ii) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan yang Berkualitas; dan (iii) Dukungan Manajemen yang dijabarkan secara teknis dalam 5 (lima) Kegiatan sebagaimana tersaji pada infografis dibawah ini::





**4.3.****Kegiatan Presisi Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023**

Pertanian presisi (*precision agriculture*) merupakan pengembangan pertanian modern yang ditandai, salah satunya dengan perubahan pola pikir penggunaan sumber daya hayati dan nonhayati yang tepat sesuai dengan kebutuhan dalam sistem produksi pertanian. Pertanian presisi mengedepankan konsep pertanian dengan pendekatan sistem untuk menuju pertanian dengan rendah pemasukan (*low-input*), efisiensi tinggi, berkelanjutan, dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Konsep yang diperhatikan yaitu dengan pendekatan sistem (*system approach*) yang memperhatikan input, proses, output, dan *outcome*. Pendekatan pengembangan peternakan presisi dilakukan dalam model pembangunan peternakan Kambing Domba serta Ayam Lokal dan Itik Pedaging.

Dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang ada, dan dalam rangka lebih menumbuhkan sumber ekonomi baru, pemerintah akan melakukan upaya-upaya terobosan untuk mengakselerasikan pengembangan kambing dan domba untuk peternak rakyat dan pelaku usaha lainnya melalui program Koporasi Kambing dan Domba. Program ini akan terus disempurnakan dan dikembangkan di seluruh lokasi potensial untuk meningkatkan populasi, produksi dan daya saing komoditas kambing dan domba untuk kesejahteraan peternak dan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Gambar Peternakan Presisi melalui Model *Closed Loop* Pengembangan Usaha Peternakan Kambing/ Domba



Gambar diatas menunjukkan bahwa peternakan presisi dengan usaha peternakan kambing/ domba melibatkan:

- Delapan *stakeholder* yaitu: a) Pemerintah; b) Lembaga Keuangan; c) Peternak Mitra dalam *cluster*; d) Usaha *Breeding Farm/Feedmill/Perusahaan Obat*; d) *Offtaker*; f) RPHU Swasta/Dinas; g) Hotel, restoran, dan catering (horeka); dan h) Usaha Pengolahan Hasil Peternakan.
- Masing-masing *stakeholder* ini berfungsi sesuai dengan tugasnya.
 - Pemerintah bertugas (i) Melakukan percepatan duplikasi dan multifikasi korporasi peternakan kambing domba dengan model *closed loop*; (ii) Melakukan pengawasan terhadap akses bibit unggul dan bahan pakan; (iii) Melakukan pembinaan teknis monitoring dan evaluasi program korporasi.
 - Lembaga keuangan bertugas melakukan pembiayaan usaha budidaya dengan KUR.
 - Peternak Mitra dalam *cluster* bertugas menerima pelayanan dari bank pakan yaitu penyediaan benih/bibit pakan, melakukan penjualan online, *closed house* dan pemberian pakan.
 - Usaha *breeding farm/feedmill/Perusahaan Obat Hewan* sebagai penyedia benih/bibit berstandar, pemasok pakan, obat-obatan hewan.
 - Offtaker* yaitu asosiasi/perusahaan/perorangan bertugas melakukan jaminan ketersediaan pakan, benih/bibit, Obat hewan, Vitamin ke *cluster* peternak kambing domba. Melakukan pendampingan teknis, non teknis dan manajerial serta penyerapan produk yang dihasilkan dari peternak mitra.
 - RPH swasta/Dinas melakukan pemotongan dari peternak mitra.

- g. Industri Horeka.
 - h. Unit pengolahan untuk mengolah hasil peternakan menjadi pangan olahan kambing domba lainnya.
3. Diperlukan dukungan Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian dengan memperlancar KUR dan pemberian alat mesin pertanian (alsintan) peternakan; Badan Standarisasi Instrumen Pertanian dengan pengawalan dan pemberian teknologi dan standarisasi; Badan Pengembangan Sumber dan Manusia Pertanian dengan melakukan bimbingan teknis pelatihan dan *entrepreneurship*; Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura memetakan biomassa pakan dan lahan yang terintegrasi.

Lokasi pengembangan peternakan presisi dengan model usaha *closed loop* peternakan kambing domba terdiri dari lokasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 tahun 2018 dan lokasi berdasarkan pemilihan Tim *Champion* yang dilakukan bersama swasta. Lokasi tersebut adalah sebagai berikut:



Pengembangan *closed loop* peternakan kambing/domba lokasi berdasarkan Kepmentan Nomor 472/2018 dan pengembangan *champion* usaha ternak kambing/domba dibedakan karena Tim *Champion* dianggap telah berhasil untuk dijadikan contoh bagi lokasi pengembangan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/2018. Lokasi *Champion* ini dapat dijadikan sebagai lokasi *pilot project* peternakan presisi dengan model usaha kambing domba.



Selanjutnya, Pendekatan pengembangan peternakan presisi dapat dilakukan dalam model pembangunan peternakan ayam lokal yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar diatas menunjukkan bahwa peternakan presisi dengan usaha peternakan kambing/ domba melibatkan:

- Delapan *stakeholder* yaitu: a) Pemerintah; b) Lembaga Keuangan; c) Peternak Mitra dalam *cluster*; d) Usaha *Breeding Farm/Feedmill/Perusahaan Obat*; d) *Offtaker*; f) RPHU Swasta/Dinas; g) Hotel, restoran, dan katering (horeka); dan h) Usaha Pengolahan Hasil Peternakan.

2. Masing-masing stakeholder ini berfungsi sesuai dengan tugasnya.
 - a. Pemerintah bertugas (i) Melakukan percepatan duplikasi dan multifikasi korporasi peternakan ayam lokal dengan model *closed loop*; (ii) Melakukan pengawasan terhadap akses bibit unggul dan bahan pakan; (iii) Melakukan pembinaan teknis monitoring dan evaluasi program korporasi.
 - b. Lembaga keuangan bertugas melakukan pembiayaan usaha budidaya dengan KUR.
 - c. Peternak Mitra dalam *cluster* bertugas menerima pelayanan dari bank pakan yaitu mesin tetas, melakukan penjualan online, *closed house* dan pemberian pakan.
 - d. Usaha *breeding farm/feedmill*/Perusahaan Obat Hewan sebagai penyedia DOC berstandar, pemasok pakan, obat-obatan hewan.
 - e. *Offtaker* yaitu asosiasi/perusahaan/perorangan bertugas melakukan jaminan ketersediaan pakan, DOC, obat hewan, vitamin ke *cluster* peternak ayam lokal. Melakukan pendampingan teknis, nonteknis dan manajerial serta penyerapan *livebird* yang dihasilkan dari peternak mitra. *Offtaker* menyediakan kurang lebih 5.000 ekor/hari dengan alat angkut khusus untuk RPHU swasta/Dinas.
 - f. RPHU swasta/Dinas melakukan pemotongan *livebird* dari peternak mitra dengan ukuran karkas 0,4 – 0,5 kg/ekor.
 - g. Industri Horeka.
 - h. Unit pengolahan untuk mengolah hasil peternakan menjadi pangan olahan bebek lainnya.
3. *Closed loop* pengembangan ayam lokal dapat terdiri dari 1 *cluster* dengan 20 peternak mitra, dengan jumlah 3.000 ekor /peternak. Siklus panen 15.000 ekor per hari dengan target daya hidup 95%, FCR 2,5 – 2,6 dan umur panen 60 – 70 hari serta BW 0,9 – 1 kg.
4. Diperlukan dukungan Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian dengan memperlancar KUR dan pemberian alat mesin pertanian (alsintan) peternakan; Badan Standarisasi Instrumen Pertanian dengan pengawalan dan pemberian teknologi dan standarisasi; Badan Pengembangan Sumber dan Manusia Pertanian dengan melakukan bimbingan teknis pelatihan dan *entrepreneurship*; Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura memetakan biomassa pakan dan lahan yang terintegrasi.

Lokasi pengembangan peternakan presisi dengan model usaha *closed loop* peternakan ayam lokal terdiri dari lokasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 tahun 2018 dan lokasi berdasarkan pemilihan Tim *Champion* yang dilakukan bersama swasta. Lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

4.4.

Dukungan Anggaran Tahun 2023



BAB V PENUTUP



PENUTUP

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 disusun secara obyektif berdasarkan pelaksanaan Program/Kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan pada periode 2022. Laporan Tahunan 2022 ini menyajikan informasi capaian kinerja Program/Kegiatan yang telah memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional ditengah kondisi pandemi *Covid-19* dan ancaman global krisis pangan serta sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun berikutnya sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2022.

Secara umum capaian Program/Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa target yang belum tercapai sehingga diperlukan upaya dan kerja keras Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mensinergikan seluruh pemangku kepentingan di pusat maupun daerah guna mewujudkan Peternakan Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Modern.

Demikian penyajian Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 untuk menjadi langkah korektif dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam mendukung pencapaian Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penyusunan Laporan Tahunan ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga saran dan kritik konstruktif terbuka untuk disampaikan.

Lampiran 1

**Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021-2024**

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	%	87,00	90,00	92,00	95,00
	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	15,00	20,00	25,00	30,00
Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Ternak	Peningkatan Produksi Daging (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam, Babi, Itik)	%	0,85	1,20	1,24	1,28
		Peningkatan Produksi Susu	%	0,55	0,61	0,71	0,85
		Peningkatan Produksi Telur	%	2,15	2,16	2,16	2,16
	Meningkatnya Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	%	85,20	85,50	85,70	86,00
	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,50	80,50	81,00	81,00

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
	Menular Strategis						
	Meningkatnya Luas Wilayah yang Terkendali dari <i>Zoonosis</i>	Persentase Wilayah yang Terkendali dari <i>Zoonosis</i>	%	74,00	74,50	75,00	76,00
	Termanfaatkannya Sarana Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	91,25	92,25	93,50	94,50
Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	32,75	33,50	34,00	35,50
	Terkelolanya Anggaran lingkup Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,68	88,93	90,32	90,85

Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Revisi 2, 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Harsono RM No.3

Gedung C Lt 6 - 9, Ragunan, Kec. Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12550

Telp: (021) 7815580-83, 7847319